



Pencapaian
200
HARI KERJA
Kepala BPOM RI

DARI AKAR
NUSANTARA
MENUJU PANGGUNG
DUNIA

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Pencapaian
200
HARI KERJA
Kepala BPOM RI

**DARI AKAR
NUSANTARA
MENUJU PANGGUNG
DUNIA**

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

PENDAHULUAN

Pengawasan obat dan makanan di Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama: pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Ketiga pilar ini bekerja sama untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

Pilar pertama adalah pelaku usaha, yang mencakup produsen, distributor, dan pengecer. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan dan edarkan aman dikonsumsi masyarakat. Untuk itu, pelaku usaha diwajibkan menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif, seperti Good Manufacturing Practice (GMP) yang diakui secara internasional.

Pilar kedua adalah pemerintah sebagai regulator, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara luas dan kompleks. Saat ini, BPOM mengoperasikan 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 42 Balai Besar/Balai POM di ibu kota provinsi dan 34 Loka POM di kabupaten/kota. UPT tersebut dilengkapi dengan laboratorium modern yang mampu melakukan pengujian produk secara akurat dan valid. Jaringan ini menjadi tulang punggung pengawasan obat dan makanan nasional.

Pilar ketiga adalah masyarakat sebagai konsumen atau pengguna akhir. Masyarakat memiliki peran

penting dalam pengawasan, terutama melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan produk yang dikonsumsi.

Saat ini, tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin kompleks. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat melantik dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. sebagai Kepala BPOM RI pada 19 Agustus 2024, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/PPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BPOM.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden menyampaikan lima arahan strategis kepada BPOM, yaitu:

Memastikan seluruh produk makanan yang beredar di Indonesia aman, bergizi, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

- Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga yang mendukung sistem pengawasan obat dan makanan.

- Mendukung kemandirian penyediaan obat dalam negeri dan mempermudah akses masyarakat terhadap obat yang dibutuhkan.

- Mempercepat proses uji klinik hingga rilis obat untuk digunakan oleh masyarakat.

- Meningkatkan reputasi Indonesia melalui peran BPOM sebagai regulator obat dan makanan yang diakui secara global.

Selain kelima arahan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kemudahan akses terhadap obat-obatan esensial, upaya

penurunan harga obat agar lebih terjangkau, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan isu kesehatan nasional.

Kini, 200 hari telah berlalu sejak pelantikan Kepala BPOM. Meski 200 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai seluruh capaian, periode ini kerap digunakan sebagai tolok ukur awal untuk menilai arah kebijakan dan kinerja pimpinan baru. Evaluasi ini penting sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas, serta untuk memastikan pelaksanaan arahan Presiden telah berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan hal tersebut, diterbitkanlah buku Pencapaian Kinerja 200 Hari Kepala BPOM 2024 – Taruna Ikrar. Buku ini memuat rangkuman kegiatan, capaian, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kepala BPOM selama 200 hari pertama masa jabatannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran BPOM dan para mitra kerja atas dukungan dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi untuk memperkuat kinerja BPOM ke depan, dalam rangka melindungi masyarakat serta meningkatkan peran BPOM sebagai regulator pengawasan obat dan makanan yang kredibel, berintegritas, dan profesional hingga di tingkat global.

Pencapaian
200
HARI KERJA
Kepala BPOM RI

**DARI AKAR
NUSANTARA
MENUJU PANGGUNG
DUNIA**

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Taruna Ikrar
Kepala BPOM RI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat terus hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat dari waktu ke waktu, dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan manfaat obat dan makanan, sejak sebelum proses produksi hingga produk tersebut beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, baik dari aspek eksternal maupun internal, BPOM senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan inovasi serta pendekatan baru guna mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan ke depan. Upaya ini dilakukan agar BPOM tidak terjebak dalam rutinitas atau pola business as usual, melainkan terus berkembang menjadi lembaga yang profesional, kredibel, dan independen. Harapan besar inilah yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengacu pada arahan Presiden, tugas birokrasi tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pembelanjaan anggaran, serta pelaporan akuntabilitas. Lebih dari itu, Presiden menekankan bahwa hasil kerja

birokrasi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata, termasuk di sektor obat dan makanan.

Laporan ini, Laporan Kinerja 200 Hari Kepala BPOM, memuat berbagai capaian kinerja serta perkembangan dan inovasi yang telah dilaksanakan selama periode September 2024 hingga Mei 2025. Beberapa aspek penting yang menjadi sorotan dalam laporan ini meliputi: implementasi direktif Presiden, percepatan pelayanan publik, penguatan penindakan, perumusan Grand Design Laboratorium, serta pengembangan kerja sama lintas sektor.

Melalui laporan ini, BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan pembenahan dan perbaikan secara berkelanjutan. Ikhtiar tersebut diwujudkan dalam bentuk kinerja unggul yang didasarkan pada hasil pengawasan serta umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui dampak dan manfaat nyata dari keberadaan BPOM.

Sebagai bagian dari kesiapan menghadapi masa depan, BPOM telah menetapkan Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan 2025–2045 yang sejalan dengan visi besar Indonesia Emas

2045. Visi tersebut menempatkan BPOM sebagai lembaga yang menjulang di kancah internasional, membumi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mengakar kuat dalam mendukung pembangunan nasional.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh jajaran BPOM yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mewujudkan berbagai capaian dalam 200 hari pertama masa kepemimpinan saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para mitra BPOM yang telah mendukung dan bersinergi dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang demi melindungi kesehatan masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa.

Jakarta, Juni 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Taruna Ikrar

Pencapaian **200** HARI KERJA
Kepala BPOM RI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi Direktif Presiden oleh BPOM

1. Penguatan Standar Global: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan arahan Presiden melalui berbagai langkah strategis yang menyeluruh. Salah satu langkah penting adalah mempertahankan keanggotaan Indonesia dalam forum Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), sebuah organisasi internasional di bidang pengawasan farmasi. Untuk itu, BPOM melakukan reassessment dengan mengintegrasikan sistem mutu pengawasan, melakukan simulasi inspeksi, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinspektur. Upaya ini memperkuat posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang memenuhi standar global.

2. Percepatan Akses Obat: Dalam mendukung percepatan akses dan penurunan harga obat, BPOM melakukan berbagai inovasi, seperti peluncuran kegiatan kick-off registrasi ulang obat generik, yang menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Hingga akhir 2024, BPOM telah menyelesaikan 915 nomor izin edar yang masa berlakunya telah habis. Selain itu, melalui program "FAST", BPOM mempercepat registrasi perubahan sumber bahan baku garam farmasi lokal guna meningkatkan kemandirian industri obat nasional. Upaya ini dilengkapi dengan pengembangan fitofarmaka melalui kolaborasi riset, industri, dan akademisi untuk menghadirkan produk berbahan alam yang terstandarisasi dan terjangkau.

3. Kemandirian Bahan Baku: Kemandirian bahan baku obat juga menjadi perhatian penting. Melalui peluncuran AIRINDO, pelatihan kepada pemasok bahan baku, serta kolaborasi lintas sektor, BPOM mendorong ketersediaan bahan baku lokal yang berkelanjutan. Fokus ini juga sejalan

dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam.

4. Penjaminan Keamanan Farmasi dan Pangan: Dalam hal penjaminan sediaan farmasi dan pangan yang aman, BPOM memperkuat pengawasan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur melalui FOKKUS KEK. Selain itu, pengendalian resistensi antimikroba menjadi prioritas utama dengan pelibatan lintas sektor dan edukasi publik. BPOM juga memperkenalkan program "PESONA" untuk memperkuat manajemen risiko pada produk obat bahan alam dan menyelenggarakan SEMARAK Kosmetik guna mendorong inovasi dan kolaborasi industri kosmetik.

5. Pengawasan Kosmetik Ilegal: Pengawasan terhadap kosmetik ilegal juga ditingkatkan, di mana BPOM menemukan puluhan produk yang mengandung bahan berbahaya. Sementara itu, melalui Cosmetic Toll Manufacturer Expo, BPOM memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memproduksi kosmetik dengan merek sendiri melalui kontrak produksi.

6. Dukungan Daya Saing Produk Pangan: Untuk memperkuat daya saing pangan olahan nasional, BPOM memberikan pendampingan bagi produsen dalam menghadapi tantangan ekspor, serta memperkenalkan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk pangan non-risiko tinggi, yang bertujuan meningkatkan efektivitas sistem keamanan pangan nasional.

7. Percepatan Perizinan Obat Inovatif: Dalam hal percepatan perizinan obat inovasi, BPOM berhasil menerbitkan izin edar obat Fezolinetan dalam waktu 54 hari kerja melalui mekanisme reliance. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Penilai Obat 2025–2029 memperkuat kapasitas evaluasi khasiat dan keamanan obat secara ilmiah dan independen.

Secara keseluruhan, berbagai langkah BPOM ini menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan mandat Presiden, mempercepat akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, serta memperkuat kemandirian dan daya saing sektor kesehatan dan pangan nasional di kancah global.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

1. Percepatan Pelayanan Publik. BPOM terus mendorong peningkatan pelayanan publik, khususnya untuk obat tradisional dan obat bahan alam (OBA). Melalui program "Gemilang Indonesia Emas", BPOM mendukung literasi kesehatan digital dan pengembangan UMKM di sektor OBA. Peningkatan layanan ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan teknis, percepatan sertifikasi, serta pendampingan ekspor. Layanan jemput bola juga diperkuat melalui "Proaksi Berpadu", yang telah memberikan pendampingan kepada ribuan pelaku usaha dan menghasilkan puluhan ribu nomor izin edar. Pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA juga diperkuat untuk mendukung transformasi OBA menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. BPOM juga mempercepat penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas, memberikan asistensi regulatori bagi pelaku industri distribusi obat, serta mendorong kepatuhan regulasi melalui sertifikasi CDOB.

2. Penguatan Penindakan. Dalam rangka memberantas peredaran produk ilegal, BPOM meningkatkan pengawasan melalui patroli siber dan pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital. Kerja sama lintas sektor dengan e-commerce dan asosiasi juga dilakukan untuk mempersempit ruang distribusi produk ilegal. BPOM juga memetakan data kerawanan kejahatan obat dan makanan untuk memperkuat upaya cegah tangkal serta melakukan analisis mendalam terhadap tren pelanggaran.

RINGKASAN EKSEKUTIF

3. Grand Design Laboratorium.

BPOM meluncurkan grand design penguatan laboratorium sebagai fondasi sistem pengawasan yang adaptif dan modern. Langkah ini mencakup pengembangan jejaring laboratorium OBA dan kosmetik, pembentukan laboratorium regional di Jayapura, serta penguatan metode analisis dan layanan digital seperti INFALABS. Laboratorium BPOM juga kini mendukung pengawasan terhadap produk ATMPs dan berperan aktif dalam pengakuan laboratorium eksternal.

4. Kerja Sama Lintas Sektor. Untuk membangun sistem pengawasan yang kuat dan kolaboratif, BPOM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Sinergi dilakukan dengan BRIN dan Kemenkes untuk penguatan uji klinik nasional, dengan IPB dalam bidang penelitian dan edukasi, serta dengan BSSN dan BIN dalam hal keamanan siber. Di sisi masyarakat, BPOM melanjutkan program Germas Sapa yang menyatukan berbagai inisiatif pangan aman berbasis komunitas. Secara keseluruhan, berbagai langkah strategis dalam BAB II menunjukkan komitmen BPOM dalam memperkuat peran dan kapabilitasnya sebagai lembaga pengawasan yang modern, inklusif, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

5. Percepatan Pelayanan Publik.

BPOM terus mendorong peningkatan pelayanan publik, khususnya untuk obat tradisional dan obat bahan alam (OBA). Melalui program "Gemilang Indonesia Emas", BPOM mendukung literasi kesehatan digital dan pengembangan UMKM di sektor OBA. Peningkatan layanan ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan teknis, percepatan sertifikasi, serta pendampingan ekspor. Layanan jemput bola juga diperkuat melalui "Proaksi Berpadu", yang telah memberikan pendampingan kepada ribuan pelaku usaha dan menghasilkan puluhan ribu nomor izin edar. Pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA juga diperkuat untuk mendukung transformasi OBA menjadi obat herbal terstandar dan

fitofarmaka. BPOM juga mempercepat penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas, memberikan asistensi regulatori bagi pelaku industri distribusi obat, serta mendorong kepatuhan regulasi melalui sertifikasi CDOB.

6. Penguatan Penindakan. Dalam rangka memberantas peredaran produk ilegal, BPOM meningkatkan pengawasan melalui patroli siber dan pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital. Kerja sama lintas sektor dengan e-commerce dan asosiasi juga dilakukan untuk mempersempit ruang distribusi produk ilegal. BPOM juga memetakan data kerawanan kejahatan obat dan makanan untuk memperkuat upaya cegah tangkal serta melakukan analisis mendalam terhadap tren pelanggaran.

7. Grand Design Laboratorium. BPOM meluncurkan grand design penguatan laboratorium sebagai fondasi sistem pengawasan yang adaptif dan modern. Langkah ini mencakup pengembangan jejaring laboratorium OBA dan kosmetik, pembentukan laboratorium regional di Jayapura, serta penguatan metode analisis dan layanan digital seperti INFALABS. Laboratorium BPOM juga kini mendukung pengawasan terhadap produk ATMPs dan berperan aktif dalam pengakuan laboratorium eksternal.

8. Kerja Sama Lintas Sektor. Untuk membangun sistem pengawasan yang kuat dan kolaboratif, BPOM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Sinergi dilakukan dengan BRIN dan Kemenkes untuk penguatan uji klinik nasional, dengan IPB dalam bidang penelitian dan edukasi, serta dengan BSSN dan BIN dalam hal keamanan siber. Di sisi masyarakat, BPOM melanjutkan program Germas Sapa yang menyatukan berbagai inisiatif pangan aman berbasis komunitas.

9. Dukungan Manajemen. BPOM terus memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengembangan SDM melalui berbagai strategi:

- **Tunjangan dan Organisasi:**

Penyesuaian tunjangan kinerja serta penataan organisasi UPT sebagai langkah efisiensi struktural dan peningkatan layanan.

- **Manajemen SDM & Kepemimpinan:** Penerapan pendekatan neuro-leadership untuk mendukung kepemimpinan yang adaptif dan berkelanjutan.

- **Pengembangan Kompetensi:** Melalui pelatihan, sertifikasi, IELTS Prediction Test, PKPA, serta pelatihan teknis dan fungsional.

- **Budaya Kerja & Dialog:** Dialog BerAKHLAK dan Leader Dialogue mendukung budaya kerja yang sehat dan berintegritas.

- **Kolaborasi Pendidikan:** Kunjungan sekolah/universitas ke BPOM dan penerbitan Jurnal Eruditio memperkuat peran edukatif BPOM.

- **Sistem & Teknologi:** Implementasi interoperabilitas data, BPOM Command Center (BCC), SPBE, serta penggunaan infrastruktur Pusat Data Nasional.

- **Standarisasi ISO:** Penerapan dan pemeliharaan standar ISO untuk mendukung kualitas layanan dan keamanan informasi.

- **Pengadaan & Laboratorium:** Penguatan sistem pengadaan berbasis digital dan konsolidasi reagen pengujian laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan.

Dukungan BPOM Mewujudkan UMKM Berdaya Saing

BPOM memberikan dukungan nyata bagi penguatan UMKM obat dan makanan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi.

Pertama, melalui platform IDEAS (Integrated Development and Training Information System), pelaku usaha dapat mengakses pelatihan dan program pengembangan kompetensi secara digital untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kepatuhan terhadap regulasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kedua, BPOM meluncurkan program TEMAN UMKM Kosmetik sebagai respons atas tingginya pelanggaran penandaan kosmetik. Pendekatan dilakukan secara on-site melalui inspeksi sarana dan melalui event bimbingan teknis. Program ini telah menjangkau 311 pelaku UMKM kosmetik secara hybrid, baik oleh BPOM pusat maupun UPT.

Ketiga, dalam upaya mempercepat perolehan izin edar pangan olahan bagi UMKM, BPOM menyelenggarakan program pendampingan registrasi pangan olahan yang bersifat jemput bola, mencakup sosialisasi, bimtek, coaching, dan desk registrasi. Hasilnya, hingga 2024 telah terbit 3.406 Izin Edar UMKM dari 2.318 pelaku usaha yang didampingi.

Selanjutnya, melalui program SAPA (Sadar Pangan Aman) UMK, BPOM membina UMK pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan pangan. Program ini dilakukan bersama mitra kampus (SAPA Kampus) dan industri besar (Orang Tua Angkat), serta dilengkapi dengan berbagai skema pendampingan seperti bimtek CPOB dan e-registrasi. Hingga akhir 2024, telah diterbitkan 884 IP CPOB untuk pelaku UMK.

Terakhir, Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan melibatkan 27 industri besar untuk membina pelaku usaha kecil melalui model inclusive closed loop dan one way system. Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan teknis dan kualitas antara pelaku usaha besar dan kecil, serta mempercepat UMK memenuhi standar mutu dan legalitas produk.

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan skor tertinggi pada tahun 2024 sebesar 96,24, mencerminkan konsistensi dalam penyederhanaan birokrasi, pelayanan publik yang cepat, dan zona integritas di seluruh unit kerja.

Seluruh ASN BPOM juga menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap pelaporan harta kekayaan, dengan capaian 100% pelaporan LHKPN tahun 2024.

Untuk memperkuat budaya integritas, BPOM menggelar Café Integritas Seri 4 dengan tema "Judi Online di Kalangan ASN", bertujuan meningkatkan kesadaran risiko hukum dan sosial serta mendorong ASN menjaga nilai integritas.

Dalam aspek pengawasan internal, BPOM mengembangkan sistem SIMAKIN dan SAPA APIP untuk menyatukan manajemen kinerja dan risiko. Integrasi ini memungkinkan pemetaan risiko unit kerja secara langsung dalam sistem kinerja. Di samping itu, BPOM menerapkan Continuous Auditing and Monitoring (CACM) melalui dashboard baru di Command Center (BCC) untuk memastikan pengawasan real-time, transparan, dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),

BPOM aktif dalam dua fokus utama: Penguatan tata kelola impor dan Digitalisasi. Melalui integrasi sistem SSm Perizinan, e-Pharm, dan Exim, BPOM bersama KPK dan Kementerian/Lembaga lain memperkuat sistem pengawasan perizinan ekspor-impor khususnya untuk komoditas narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan ke Depan

Dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, BPOM terus mendorong transformasi digital dan inovasi layanan publik.

Salah satu inovasi utama adalah pengembangan aplikasi BPOM Mobile dengan tagline "Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman". Aplikasi ini memungkinkan masyarakat memverifikasi legalitas dan keamanan produk secara mandiri melalui pemindaian 2D Barcode atau pencarian nomor registrasi.

BPOM Mobile juga menyediakan fitur pelaporan untuk masyarakat yang menemukan produk mencurigakan. Aplikasi ini telah diimplementasikan sejak 2018 dan terus diperkuat sebagai bagian dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kehadiran BPOM Mobile menjadi simbol keterbukaan informasi, peningkatan partisipasi publik, serta transparansi dalam pengawasan obat dan makanan nasional.

Pencapaian
200
HARI KERJA
Kepala BPOM RI

**DARI AKAR
NUSANTARA
MENUJU PANGGUNG
DUNIA**

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

DAFTAR ISI

BAB I. Implementasi Direktif Presiden	1
BPOM Menuju Standar Global	2
Mempertahankan Keanggotaan Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)	2
Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi	2
Kick Off Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat Generik	2
BPOM selesaikan 915 Registrasi Ulang Obat Generik	5
BPOM Bergerak FAST	5
Hilirisasi dan Penguatan Fitofarmaka Melalui Business Matching Peneliti, Industri dan Lembaga Riset	7
Program Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam	7
Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman	9
FOKKUS KEK SANUR	9
Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba	9
"Tebar" PESONA untuk Produk Aman dan Berkualitas	12
SEMARAK Kosmetik: Selebrasi Inovasi untuk Produk Aman dan Berkualitas	12
Public Warning Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya	13
Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024: Mengawal Kemajuan Industri Kosmetik Nasional	13
Pengawasan Ekspor Pangan: Memastikan Keamanan dan Mendorong Daya Saing	14
Program Manajemen Risiko	15
Percepatan Perizinan Obat Inovasi	16
Penerbitan Izin Edar Fezolinetant Tablet	16
BPOM Bentuk Komnas Penilai Obat 2025–2029 untuk Perkuat Regulasi dan Mutu Obat	16
BAB II. Memperkuat Peran Strategis BPOM	17
Percepatan Pelayanan Publik	18
Peningkatan Layanan terhadap Obat Tradisional	18
Pelayanan Proaksi Berpadu	18
Pendampingan Penelitian Uji Praklinik/Klinik	19
Percepatan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas	19
Asistensi Regulatori Pelayanan Publik Sertifikasi CDOB	20

Penguatan Penindakan	21
Patroli Siber Perangi Produk Ilegal	21
Pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital	21
Kolaborasi Pengawasan Produk Ilegal	25
Cegah Tangkal Ungkap Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	26
Analisis Fenomena Kejahatan Antisipasi Pelanggaran	26
Grand Design Laboratorium	27
Launching Grand Design Penguatan Laboratorium	27
Dukungan BPOM terhadap ATMPs	27
Pengembangan Jejaring Laboratorium	28
Regionalisasi Laboratorium	28
Pengembangan Metode Analisis Pengujian	29
Layanan Penyediaan Baku Pembanding untuk Pengujian	29
Pilot Project Rekognisi Laboratorium	30
Kerja Sama Lintas Sektor	31
Sinergi untuk Ekosistem Uji Klinik Berkualitas dengan BRIN dan Kemenkes	31
Penandatanganan MoU dengan IPB	31
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN dan BIN	37
GERMAS SAPA Budayakan Hidup Sehat	37
Dukungan Manajemen	40
Perkembangan Penyesuaian Tunjangan Kinerja BPOM	40
Penataan Organisasi UPT BPOM	40
Strategi Kepemimpinan dan Manajemen SDM dalam Kerangka Implementasi Ekonomi Sirkular	41
Pendidikan Lanjutan dan Pengembangan Kompetensi Global BPOM	41
BPOM turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia	42
Pengembangan Kompetensi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	42
Dialog Kepala BPOM dan Leader Dialogue	43
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM POM melalui Sertifikasi	43
Kunjungan Sekolah atau Universitas ke Lingkungan BPOM Pusat	44
Penilaian Kompetensi Melalui Perbandingan Antara Capaian Kompetensi Pegawai dan Persyaratan Dengan Standar Kompetensi	44
Pengembangan Kompetensi Dalam Negeri (Pelatihan Fungsional dan Teknis)	45
IELTS Prediction Test untuk Peningkatan SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Berdaya Siang Global	45
Penerbitan Jurnal Eruditio	46
Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	46
Interoperabilitas Data Pengawasan Obat dan Makanan	47
Implementasi BPOM Command Center (BCC)	47
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM	48
Penerapan ISO	48
Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data	49
Indeks Tata Kelola Pengadaan BPOM	49
Pengadaan Reagensia Pengujian	50

BAB III. Dukungan BPOM Mewujudkan UMKM Berdaya Saing 51

Dukungan BPOM Terhadap UMKM Bagi Pelaku Usaha Obat dan Makanan	52
Teman UMKM Kosmetik.....	52
Pendampingan Registrasi Pangan Olahan.....	53
Pemberdayaan UMK - SAPA	54
Pemberdayaan UMKM - Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan.....	54

BAB IV. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas 55

Indeks RB BPOM Tahun 2024	56
Pelaporan LHKAN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara).....	57
Cafe Integritas Series 4	57
Digitalisasi Pengawasan Intern.....	58
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	58

BAB V. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan Kedepan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 59

BPOM Mobile	60
-------------------	----



Pencapaian
200
HARI KERJA
Kepala BPOM RI

**DARI AKAR
NUSANTARA
MENUJU PANGGUNG
DUNIA**

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D



BAB I. IMPLEMENTASI DIREKTIF PRESIDEN

BPOM Menuju Standar Global

Mempertahankan Keanggotaan Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)

Pengawasan berstandar global terus diperkuat untuk mewujudkan produk yang aman, berdaya saing, dan diakui secara internasional. Salah satunya melalui Reassessment keanggotaan Indonesia dalam forum Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) pada 2-6 Desember 2024. Sebagai organisasi internasional di bidang farmasi, PIC/S memfasilitasi kerjasama antara otoritas pengawas obat di seluruh dunia yang mencakup berbagai produk farmasi, termasuk obat bahan alam.

Upaya Lolos Reassessment PIC/S

Integrasi Sistem Mutu Inspektorat
Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
(CPOTB)



Mock-Inspection kepada
Industri Obat Tradisional (IOT)



Rapat Persiapan dan Pembaruan
Perkembangan secara Berkala



Forum Komunikasi CPOTB dan
Pertemuan Koordinasi Inspektur



Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi

Kick Off Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat Generik

BPOM Percepat Registrasi Ulang Obat Generik melalui kegiatan *Kick Off* Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat Generik. Inisiatif ini menjadi langkah awal untuk mendukung percepatan registrasi obat dalam program JKN. BPOM terus memberikan pendampingan dan asistensi regulatori kepada industri farmasi agar dapat memenuhi regulasi yang terus berkembang, sekaligus mempercepat proses registrasi. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) dan diikuti oleh 77 industri farmasi.





Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) Re-Assessment yang diselenggarakan di Kantor BPOM pada Senin (3/12/2024). Re-assessment atau penilaian kembali ini dilakukan sebagai bagian dari proses perpanjangan keanggotaan BPOM di dalam PIC/S yang telah dimulai sejak tahun 2012.



Kepala BPOM RI Taruna Ikrar melakukan visitasi ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Santosa Hospital Bandung Central (SHBC) pada Rabu (16/4/2025). Visitasi ini dilakukan Kepala BPOM beserta jajaran dalam rangka memastikan pengelolaan dan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai standar.



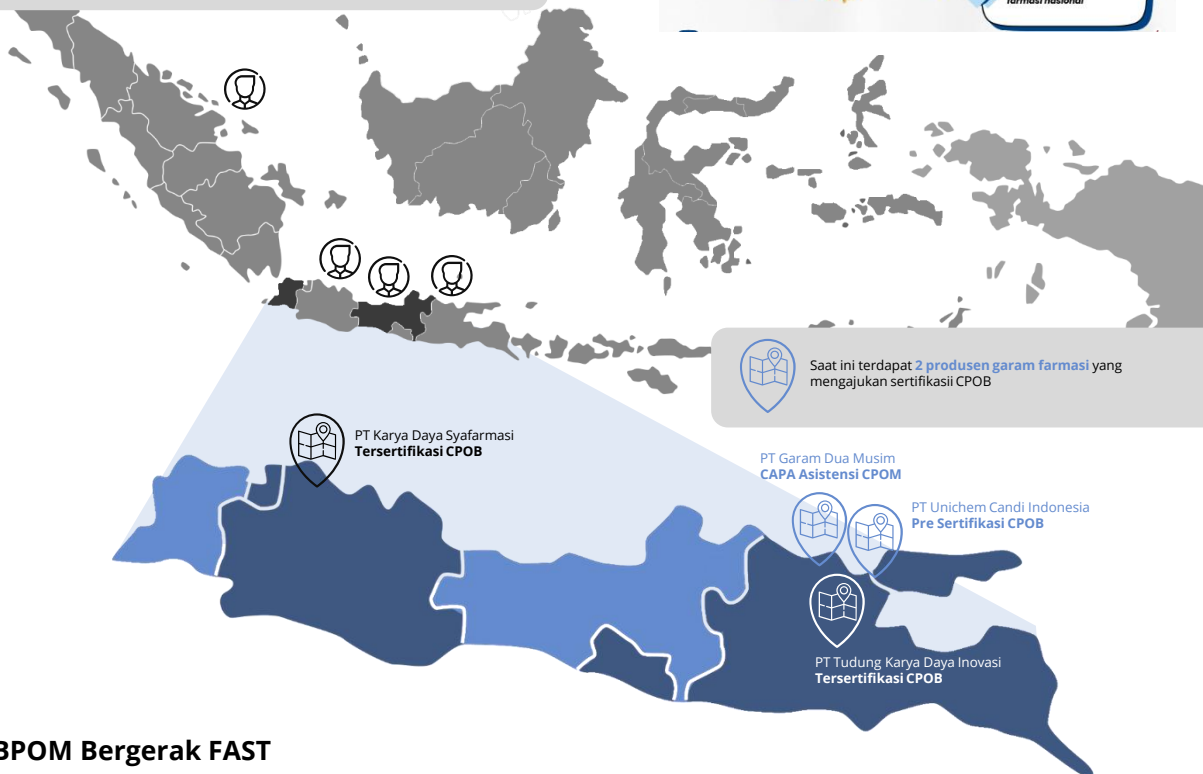
Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi

BPOM selesaikan 915 Registrasi Ulang Obat Generik

Sepanjang tahun 2024, BPOM secara proaktif menjalin kolaborasi sinergis dengan industri farmasi nasional di empat wilayah GPFI: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Hasilnya, BPOM berhasil menyelesaikan 915 nomor izin edar (NIE) obat yang masa berlakunya telah habis, sesuai laporan GPFI pada Oktober 2024. Pencapaian ini mencerminkan komitmen BPOM dalam mempercepat registrasi ulang obat, sekaligus menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar di Indonesia.



Penyelesaian ini dilakukan sebagai puncak kolaborasi sinergis dengan Industri Farmasi di 4 titik GPFI (Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)



BPOM Bergerak FAST

BPOM Bergerak FAST (Beraksi Percepat Registrasi Perubahan Garam Lokal, Fix Aman Standar Terjaga) adalah inisiatif BPOM untuk mendorong penggunaan bahan baku obat lokal, khususnya garam farmasi dalam negeri. Program ini mempercepat proses registrasi perubahan sumber bahan baku agar obat yang dihasilkan tetap aman, berkhasiat, dan bermutu. BPOM juga memberikan pendampingan regulatori kepada industri farmasi agar proses berjalan lebih cepat dan sesuai standar. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyediaan obat yang berkualitas dan terjangkau.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif



**Kolaborasi Sinergis BPOM - Industri Farmasi
Obat dengan Garam Farmasi Nasional**

BPOM BERGERAK *FAST*
**BPOM Beraksi Percepat Registrasi Perubahan Garam Lokal -
Fix Aman, Standar Terjaga**

Jakarta, 3-4 Februari 2025



BPOM melaksanakan kegiatan Kolaborasi Sinergis BPOM-Industri Farmasi Obat dengan Garam Farmasi Nasional pada
Senin (3/2/2025) di Auditorium lantai 8 Gedung Merah Putih Kantor BPOM. Kepala BPOM Optimistis Wujudkan Kemandirian
Garam Farmasi Sebagai Bahan Baku Obat Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Sediaan Farmasi

Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi

Hilirisasi dan Penguatan Fitofarmaka Melalui *Business Matching* Peneliti, Industri dan Lembaga Riset

BPOM menginisiasi kegiatan strategis bertajuk *Business Matching* Peneliti, Industri, dan Lembaga Riset Fitofarmaka bersama RS Universitas Airlangga. Tujuannya membangun kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan lembaga penelitian. Kerja sama ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan inovasi dengan proses komersialisasi produk. Salah satu fokus utama adalah pengembangan fitofarmaka yang telah teruji keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji klinik sehingga dapat disejajarkan

dengan obat modern. Pengembangan fitofarmaka melalui model kolaboratif ini diharapkan dapat menurunkan harga sediaan farmasi. Dengan bahan baku lokal yang terstandarisasi dan proses produksi yang efisien, biaya produksi dapat ditekan sehingga produk akhir menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Kutipan:

“Fitofarmaka bisa menjadi solusi lokal yang tidak hanya menjawab kebutuhan nasional, tapi juga memiliki potensi untuk bersaing di pasar global.

-Kepala BPOM, Taruna Ikrar-



Kepala BPOM mengunjungi fasilitas uji klinik di RS Universitas Airlangga untuk melihat proses uji klinik sebagai tahapan penting dalam pengembangan produk berbahan alam, Surabaya (19/9/2024).

Program Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam

Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor serta menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas bagi industri. Hal ini sekaligus mendukung Asta Cita ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Seiring dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.

Salah satu aspek yang mendukung pengembangan fitofarmaka tersebut adalah aspek Standardisasi bahan baku OBA. Kendala dan tantangan dalam hal tersebut adalah belum tersedianya bahan baku OBA yang sustainable dan terjaga ketersediaannya.

Langkah Strategis

1. **Peluncuran AIRINDO (Asosiasi Industri Ekstrak Bahan Alam dan Rempah Indonesia)**, ada 8 anggota Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
2. **Kolaborasi lintas sektor** (Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BRIN, AIRINDO, GP Jamu, dan pelaku industri)
3. **Focus Group Discussion Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam** (Ada 50 Simplisia Bahan Baku OBA yang menjadi prioritas dan banyak digunakan)
4. **Pelatihan Peningkatan Pemahaman Supplier Bahan Baku Obat Bahan Alam** (Suplier diberi pelatihan cara penanganan bahan baku simplisia setelah pasca panen)
5. **Penentuan Duta inspiratif** dalam membangun kemandirian bahan baku OBA
6. **Penghargaan** kepada Asosiasi yang berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian bahan baku OBA



BPOM melaksanakan kegiatan Kolaborasi Sinergis BPOM-Industri Farmasi Obat dengan Garam Farmasi Nasional pada Senin (3/2/2025) di Auditorium lantai 8 Gedung Merah Putih Kantor BPOM. Kepala BPOM Optimistis Wujudkan Kemandirian Garam Farmasi Sebagai Bahan Baku Obat Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Sediaan Farmasi

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

FOKKUS KEK SANUR

FOKKUS KEK Sanur (Forum Koordinasi Khusus SAS di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur) adalah inisiatif untuk memperkuat pengawasan obat demi melindungi masyarakat. Kegiatan ini fokus pada pengawalan pemasukan *Special Access Scheme* (SAS) obat serta mempererat koordinasi antara BPOM dan para pemangku kepentingan di KEK Sanur. Selain itu, FOKKUS KEK Sanur juga bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang alur pemasukan obat jalur khusus dan aturan uji klinik di Indonesia.

Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas Kepala BPOM. Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi kesehatan global yang semakin mengkhawatirkan. Penggunaan antimikroba yang tidak bijak dan substandar telah mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Akibatnya, infeksi umum yang sebelumnya mudah diobati kini menjadi lebih sulit, mahal, bahkan mematikan.

Kondisi ini mengancam keberhasilan pengobatan modern, termasuk operasi besar dan terapi kanker, yang sangat bergantung pada efektivitas antimikroba. Tindakan kolektif dan kesadaran lintas sektor sangat diperlukan untuk mencegah krisis kesehatan yang lebih besar di masa depan. Termasuk efektivitas pengawasan BPOM terhadap mutu obat yang beredar.

“Ingat! Antibiotik bukan obat segala penyakit. Ini adalah silent pandemic jika terus dibiarkan, 10 juta kematian akibat AMR diprediksi akan terjadi pada 2050.

-Kepala BPOM, Taruna Ikrar-

Jenis Antimikroba

Pengawasan BPOM

Data Hasil Pengawasan

Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan sambutan pada acara Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba di Kantor BPOM, Jakarta (29/11/2024).

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Rancangan Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025 – 2029

5 Sasaran Strategis



PENGUATAN KEBIJAKAN



PENINGKATAN KAPASITAS



SURVEILANS



INTERVENSI



ADVOKASI DAN KERJASAMA

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan RPJMN 2025 – 2029

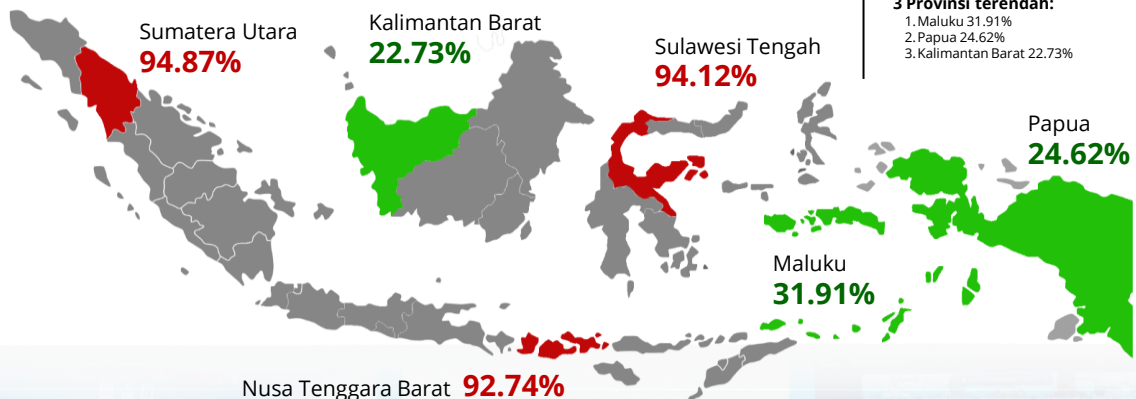
Capaian Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba

BPOM memiliki kebijakan Keputusan Kepala BPOM No.HK.02.02.1.2.03.20.98 tahun 2020 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Antimicrobial Resistance di Lingkungan BPOM tahun 2020-2024

Upaya Pengendalian Resistensi Antimikroba di UPT BPOM

- Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*)
- Bimtek dan Advokasi
- Edukasi Kepada Masyarakat Luas

Persentase Apotek yang Menjual Antibiotik Tanpa Resep Dokter 2024



3 Provinsi tertinggi:

1. Sumatera Utara 94.87%
2. Sulawesi Tengah 94.12%
3. Nusa Tenggara Barat 92.74%

3 Provinsi terendah:

1. Maluku 31.91%
2. Papua 24.62%
3. Kalimantan Barat 22.73%



Pengendalian Resistensi Antimikroba

kshow

Bahaya Resistensi Antimikroba, Upaya Nyata dari Regulator, Praktisi, Tenaga Kesehatan, dan Pelaku Usaha di Bidang Kesehatan serta Penyebarluasan Materi Edukasi C+4T



"Antibiotik bukan obat segala penyakit," tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba (29/11/2024). Puncak acara mencatat rekor MURI atas ikrar bersama terbanyak secara hybrid.

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

“Tebar” PESONA untuk Produk Aman dan Berkualitas

Program Manajemen Risiko Obat Bahan Alam adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam. Pelaku usaha diajak terlibat dan bertanggung jawab penuh atas produk obat bahan alam yang diproduksi. Pemberian kepercayaan ini memerlukan komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi yang tinggi.

SEMARAK Kosmetik: Selebrasi Inovasi untuk Produk Aman dan Berkualitas

SEMARAK Kosmetik menjadi wadah strategis untuk menampilkan inovasi, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan serta mutu produk kosmetik. Kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya dengan tema “Moving Forward Together” dengan menghadirkan sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelaku industri, komunitas *beauty enthusiast*, dan lembaga pemerintah terkait.

Program Inovatif SEMARAK

Kampanye dan dialog interaktif BERSERU (Bersama Tertibkan Skincare Beretiket Biru)
Talkshow dan Expo Cosmetic Toll Manufacturer
Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
One Stop Public Services

11

industri sebagai percontohan berdasarkan hasil penilaian mautritas level 4 & 5



Aspek penilaian maturitas

Aspek Pemenuhan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik)

- Klaster Industri berdasarkan hasil pemetaan CPOTB
- Rekam jejak pemeriksaan CPOTB
- Analisis kesenjangan (gap analysis) CPOTB 2021

Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSK)

- Rekam jejak pelanggaran keamanan
- Rekam jejak pelanggaran mutu
- Rekam jejak pelanggaran penandaan



Pelaku usaha yang ingin memiliki brand kosmetik sendiri dapat memiliki izin edar kosmetik dengan melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

-Kepala BPOM, Taruna Ikrar-



Pencapaian 200 HARI KERJA Kepala BPOM RI

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Public Warning Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya

Dalam periode November 2023 – Oktober 2024, BPOM telah melakukan pengawasan intensif terhadap produk kosmetik yang beredar di pasar, termasuk pada platform online. Dari hasil sampling dan uji laboratorium, ditemukan 55 item kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Temuan ini terdiri dari 35 item kosmetik yang diproduksi melalui kontrak produksi, 14 item kosmetik impor, dan 6 item kosmetik

yang diproduksi serta diedarkan oleh industri lokal.

"Rasa cinta dan bangga buatan Indonesia harus terus dipupuk dan kita harus bersama-sama mencegah pemasukan dan peredaran kosmetik impor ilegal yang dapat menggerus pasar kosmetik lokal" -Kepala BPOM Taruna Ikrar-

Kepala BPOM dan Menteri Perdagangan menunjukkan barang bukti kosmetik ilegal senilai Rp11,4 miliar dalam konferensi pers bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor (Kosmetik Impor Ilegal) di Kantor BPOM, Jakarta, (30/9/2024).



Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024: Mengawal Kemajuan Industri Kosmetik Nasional

Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024 merupakan bagian dari program Iklim Positif Kontrak Produksi Kosmetik yang dirancang untuk mendorong pengembangan industri kosmetik nasional melalui edukasi, supervisi, dan fasilitasi. Program ini memiliki misi strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN) Kosmetik, pelaku usaha penerima kontrak produksi, dan masyarakat umum.

"BPOM telah memberikan sebuah fasilitas kepada UMKM untuk membuka, memproduksi kosmetik tidak harus dengan pabriknya sendiri. Bisa dengan kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang telah ada, tapi memakai merek sendiri". -Kepala BPOM Taruna Ikrar-

Jumlah BUPN kosmetik mencapai 1.904 pelaku usaha atau sekitar lebih dari 50% dari total pemilik izin edar kosmetik.

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Pengawasan Ekspor Pangan: Memastikan Keamanan dan Mendorong Daya Saing

BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk pangan olahan Indonesia di pasar global. Salah satunya melalui pendampingan bagi produsen yang ingin mengekspor produknya. Pendampingan ini sangat penting mengingat masih adanya produk pangan olahan asal Indonesia yang terkendala masuk ke beberapa negara.

Untuk itu, BPOM menggelar **Focus Group Discussion (FGD) "Pengawasan Ekspor Pangan: Keamanan dan Daya Saing"** pada 4 Oktober 2024. Forum ini melibatkan lintas sektor terkait mulai dari **perwakilan k/L** (Kemenko Perekonomian, Kemendag, KKP, Kementan, Kemendagri, Kemenkeu, Barantin, Bapanas, BSN, KJRI), **Pakar Keamanan Pangan** Prof. Dedi Fardiaz, dan **Asosiasi Pelaku Usaha** (GAPMMI, APMMOI)

Tujuan Pendampingan Ekspor Pangan Olahan

Menyusun **langkah mitigasi risiko** dan pencegahan penolakan ekspor
Memperkuat **sinergi dan komitmen** lintas K/L serta pelaku usaha, agar dapat mengantisipasi terjadinya penolakan ekspor produk pangan.
Menyusun **rencana aksi** bersama kementerian/lembaga

Adanya **118 kasus** penolakan ekspor produk pangan olahan asal Indonesia di berbagai negara pada tahun 2021-2024.

Berbagai upaya yang dilakukan BPOM telah menghasilkan capaian jumlah Izin Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk keperluan ekspor. Penerbitan IP CPPOB ekspor sangat penting untuk memastikan pangan yang diproduksi aman. Hal ini juga sekaligus sebagai langkah meningkatkan level pemenuhan regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan.



Output Yang Dihasilkan

Matriks **Rencana Aksi Bersama** terkait Langkah mitigasi risiko dan pencegahan penolakan ekspor
Pembentukan **Forum Fasilitasi Ekspor Pangan** (pertemuan setiap 6 bulan untuk membahas isu terkait penolakan ekspor pangan asal Indonesia).



IP CPPOB EKSPOR



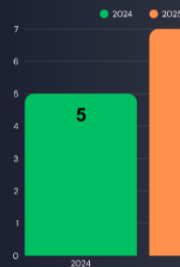
IP CPPOB PENDAFTARAN



IP PMR WAJIB



IP PMR SUKARELA



Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Program Manajemen Risiko

BPOM mendukung industri pangan untuk meningkatkan label pemenuhan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan melalui izin penerapan program manajemen risiko untuk pangan olahan non risiko tinggi. Pada 4 Maret 2025, sosialisasi dilakukan kepada industri pangan olahan sebagai wadah penguatan komitmen dalam kemandirian industri skala besar. Tujuannya industri dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerapan sistem keamanan pangan sehingga meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kepercayaan publik.



**INFORMASI LEBIH LENGKAP
DAPAT DILIHAT MELALUI
website**

<https://pmr.pom.go.id/>

- Sosialisasi
 - Desk Konsultasi
 - Pemenuhan Persyaratan
 - Proses Penyelesaian IP PMR
- Wajib dan Sukarela



"PMR ditujukan untuk kemandirian industri pangan dalam mengendalikan risiko terjadinya penyakit bawaan pangan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan oleh pelaku usaha serta dimonitor oleh BPOM, sistem OMR setara dengan private standard yang diakui secara internasional".



Lima Kunci Budaya Keamanan Pangan

1. Leadership Commitment
2. Employee Training & Competency
3. Clear Policies & Procedures
4. Open Communication & Reporting
5. Continuous Monitoring & Feedback

Keuntungan IP PMR Pangan Olahan Non Risiko Tinggi

1. Percepatan Registrasi: Waktu penilaian singkat dari 30HK jadi 15HK
2. Layanan Prioritas: Penerbitan izin CPOB lebih cepat
3. Ekspor Mudah: Surat Keterangan Ekspor Prioritas dengan track record baik (tidak ada penolakan ekspor 2 tahun terakhir, frekuensi ekspor minimal 3 kali dalam 12 bulan ke negara yang sama)

Pencapaian **200** HARI KERJA
Kepala BPOM RI



Percepatan Perizinan Obat Inovasi

Penerbitan Izin Edar Fezolinetant Tablet

BPOM berhasil menerbitkan izin edar Fezolinetant tablet salut selaput 45 mg hanya dalam 54 hari kerja. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala vasomotor (VMS) sedang hingga berat yang dialami perempuan saat menopause.

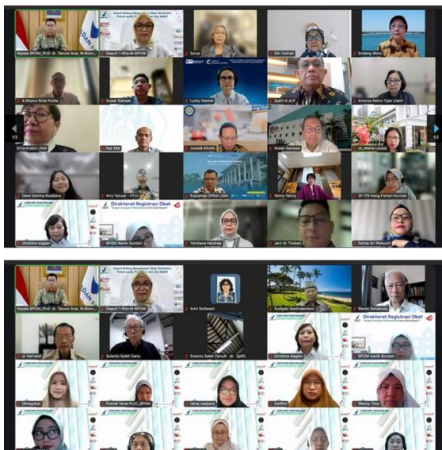
Penerbitan cepat ini menjadi bukti nyata keberhasilan penerapan mekanisme reliance di Indonesia—sebuah pendekatan yang mengacu pada hasil evaluasi dari otoritas regulatori negara lain yang sistemnya sudah mapan. Melalui mekanisme ini, waktu evaluasi registrasi obat dipersingkat dari 120 hari menjadi hanya 90 hari kerja, tanpa mengorbankan aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Langkah ini mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang berkualitas dan sesuai standar internasional.

BPOM Bentuk Komnas Penilai Obat 2025–2029 untuk Perkuat Regulasi dan Mutu Obat

Dalam upaya meningkatkan kualitas obat di Indonesia dan memperkuat peran regulatori dalam penilaian khasiat serta keamanan obat, BPOM membentuk Komite Nasional (Komnas) Penilai Obat periode 2025–2029. Pembentukan tim ini merupakan hasil kolaborasi antara BPOM dan para ahli dari berbagai bidang, seperti kedokteran, farmasi, regulasi, dan ilmu terkait lainnya. Para ahli tersebut berasal dari sembilan universitas terkemuka di Indonesia: Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin,

Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Pelita Harapan, Universitas Andalas, dan Universitas Trisakti.

Keberadaan Komnas Penilai Obat 2025–2029 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 86 Tahun 2025. Komnas Penilai Obat berperan sebagai *peer reviewer* independen, yang memberikan rekomendasi ilmiah terhadap hasil evaluasi khasiat dan keamanan obat secara komprehensif, objektif, dan berbasis bukti. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya BPOM memastikan setiap obat yang beredar di Indonesia aman, efektif, dan bermutu tinggi.



Salah satu dalam mendukung Pengawasan dan
Perkembangan **Advanced Therapy Medicinal Products**
(ATMPs) di Indonesia

10 Oktober 2024

BAB II. MEMPERKUAT PERAN STRATEGIS BPOM

Percepatan Pelayanan Publik

Peningkatan Layanan terhadap Obat Tradisional

Pelayanan publik yang prima menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk obat tradisional atau obat bahan alam (OBA). Terlebih terdapat potensi besar OBA sebagai produk andalan ekspor karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan kekuatan industri, serta komitmen dari seluruh pihak.

BPOM meluncurkan program Gemilang Indonesia Emas (Gerakan Peningkatan Literasi Kesehatan secara Digital Menuju Indonesia Emas). Kegiatan ini sebagai upaya mendukung Asta Cita Pemerintah melalui dukungan dalam pengembangan UMKM, khususnya untuk produk OBA dan suplemen kesehatan agar tetap berdaya saing di era transformasi digital.

Pelayanan Proaksi Berpadu

Proaksi Berpadu menjadi terobosan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan model jemput bola ke sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi OBA, suplemen kesehatan, dan kosmetik diharapkan dapat mempercepat penetrasi informasi pelayanan publik kepada pelaku usaha dan peneliti.

Pelayanan Proaksi Berpadu per Februari 2025



Pendampingan

4.953

Pelaku Usaha dan Peneliti



Dari pendampingan tersebut telah terbit

28.737 Nomor Izin Edar

Kepala BPOM meluncurkan program Gemilang Indonesia Emas (Gerakan Peningkatan Literasi Kesehatan secara Digital Menuju Indonesia Emas, Selasa (10/12/2024). Gemilang Indonesia Emas merupakan program hasil kolaborasi BPOM dengan Siberkreasi, berupa gerakan jejaring multi-stakeholder yang bertujuan meningkatkan literasi digital melalui konten positif dan memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan Peningkatan Layanan

Bimtek Naik Kelas UMKM OBA - Pengendalian Mutu Produk yang diproduksi industri OBA dan Non-OBA bagi UKOT



Bimtek Dukungan Ekosistem Ekspor OBA - Peningkatan Kemampuan Ekspor Pelaku Usaha



Percepatan Sertifikasi OBA dan Suplemen Kesehatan



Gemilang Indonesia Emas (Gerakan Peningkatan Literasi Kesehatan Secara Digital Menuju Indonesia Emas)



Percepatan Pelayanan Publik



Pendampingan Penelitian Uji Praklinik/Klinik

Penelitian uji praklinik/klinik sangat penting dalam tahap pengembangan obat bahan alam (OBA). Karena itu BPOM terus mendampingi peneliti dalam menyusun protokol maupun pelaksanaan proses penelitian uji praklinik/klinik OBA sampai menjadi obat herbal terstandar (OHT) dan fitofarmaka.

Dukungan Uji Praklinik/Klinik OBA:

- Simplifikasi Regulasi - Pendelegasian Wewenang Persetujuan Pelaksanaan Uji Pra Klinik/Klinik
- Pendampingan Penyusunan Protokol & Pelaksanaan Uji Praklinik/Klinik
- Evaluasi Protokol dan/atau Hasil Uji Praklinik/Klinik
- Pengembangan Aplikasi Pengajuan Uji Praklinik/Klinik
- Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha dan Peneliti

Jumlah Penelitian Uji Praklinik/KLINIK OBA per Februari 2025:

1. 130 hasil penelitian uji praklinik/klinik
Berupa Protokol dan Hasil Uji telah divalusi
2. 92 penelitian uji praklinik
3. 40 penelitian uji klinik

Percepatan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas

BPOM juga telah meluncurkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas pada 22 Oktober 2024. Hal ini bertujuan sebagai bentuk *reward* untuk pelaku usaha berkinerja baik dan dukungan BPOM pada percepatan layanan dan peningkatan ekspor.



Ketentuan Penerima Layanan

1. Pelaku usaha dengan **rekam jejak baik**
2. Tidak pernah mengalami **penolakan** dari negara tujuan ekspor dalam waktu 2 tahun terakhir
3. **Frekuensi ekspor** minimal 3 kali ke negara yang sama dalam waktu 12 bulan terakhir



Pemangkasan **timeline**:

Waktu penerbitan SKE lebih singkat

Pemangkasan **proses evaluasi**:

Langsung ke tahap rekomendasi oleh Direktur.

Benefit Layanan SKE Prioritas

1. Pelaku usaha **lebih cepat mendapatkan SKE**
2. Lebih cepat **mengakses pasar** negara tujuan
3. Meningkatkan aktivitas ekspor

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Percepatan Pelayanan Publik

ISI REGULATORI OBAT

dirian Obat dan Bahan Obat Lokal
sial, dan Berm

OSAT DAN MAKANAN IS
KINERJA OBAT, BAHAN OBAT, PERALATAN
ASISTENSI
ORASI SINERGIS BPOM - INDUSTRI FARMASI - PEDAGANG BESAR FARMASI & JAWA TIMUR
Diperkembangan Targetkan Kemandirian dan Kemandirian
Obat dan Bahan Obat Produksi Lokal yang Aman, Berkhasiat dan Bermutu
SURABAYA, 25 FEBRUARI 2025

Asistensi Regulatori Pelayanan Publik Sertifikasi CDOB

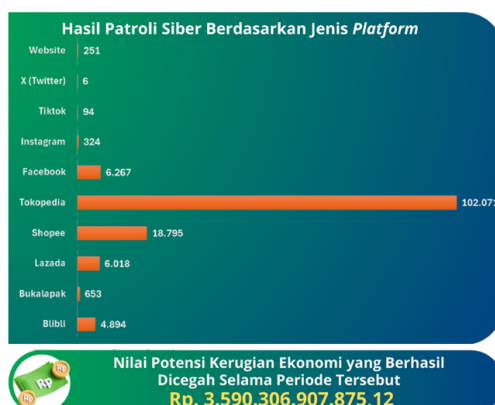
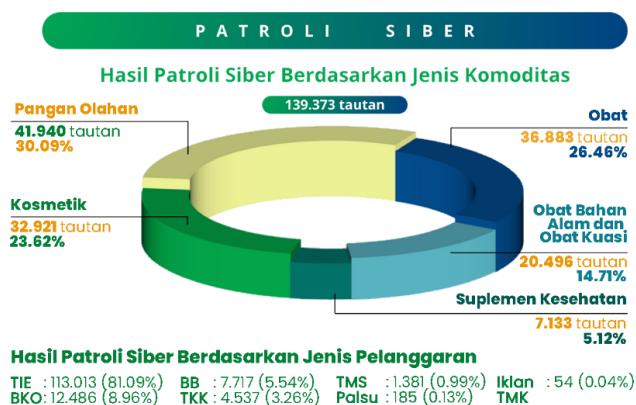
BPOM menggelar asistensi regulatori dengan tema "Tingkatkan Kepatuhan dan Kemandirian Obat dan Bahan Obat Lokal, yang Aman, Berkhasiat dan Bermutu" di Surabaya, 24-25 Februari 2025. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) Jawa Timur, berupa sharing session pengawasan distribusi obat, bimbingan teknis SMART CDOB 4.0, Desk CAPA Sertifikasi CDOB.

Tujuannya untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan komitmennya dalam kepatuhan regulasi mengingat obat adalah komoditi penting bagi kesehatan. Dalam kesempatan tersebut Kepala BPOM juga memberikan apresiasi kepada 5 PBF di Jawa Timur melalui penyerahan Sertifikat CDOB. Kolaborasi ini sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam bersinergi dengan lintas sektor untuk bersama memastikan keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar di Indonesia melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Penguatan Penindakan

Patroli Siber Perangi Produk Ilegal

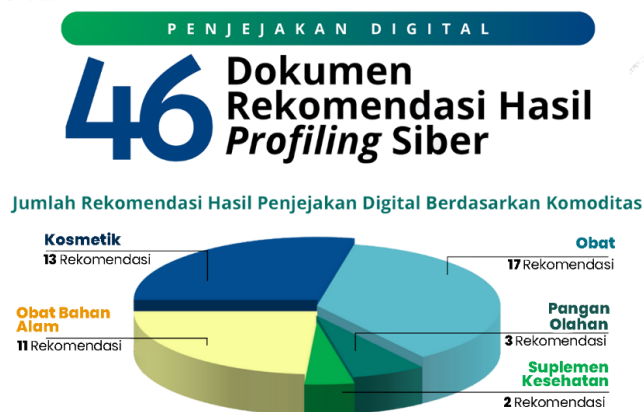
Patroli siber obat dan makanan merupakan upaya pengawasan aktif di dunia maya untuk memerangi peredaran produk ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Melalui pemantauan platform digital, media sosial, dan e-commerce, tim patroli siber BPOM menelusuri penjualan obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan, serta menindak pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.



Pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital

Laboratorium Forensik Digital BPOM berperan penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengungkap bukti-bukti elektronik terkait pelanggaran di ranah siber. Tim patroli siber melakukan analisis penjejak digital di Laboratorium Forensik Digital BPOM.

Melalui investigasi digital terhadap perangkat, jaringan, dan jejak digital pelaku, laboratorium ini membantu menelusuri asal-usul peredaran produk ilegal, mengungkap modus operandi, serta memperkuat penegakan hukum. Laboratorium Forensik Digital BPOM berhasil mempertahankan status akreditasi Surveillance ISO/IEC 17025/2017. Berkat kinerjanya, Laboratorium Forensik Digital BPOM berhasil memperoleh predikat Sangat Baik pada Uji Profisiensi dari AFDI bekerjasama dengan BSN.





KONFERENSI PERS
HASIL PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
TERHADAP ANGUR SHINE MUSCAT

B POM bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan anggur impor shine muscat yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hal ini disampaikan pada Konferensi Pers Keamanan Pangan Anggur Shine Muscat yang Beredar di Indonesia, Senin (04/11/2024) di Kantor Bapanas.



Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan pemusnahan barang bukti hasil operasi penertiban obat-obat tertentu ilegal, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang, Jumat (13/12/2024). Temuan barang bukti yang berhasil disita petugas mencakup lebih dari 1,09 miliar tablet obat jadi; 404 karung dan 83 drum bahan baku; serta 45 karung, 17.478 botol, 1.192 rol aluminium foil, dan 17.195 karton kemasan. Selain itu juga disita peralatan produksi berupa 18 unit mesin dan 2 unit truk. Total nilai keekonomian temuan di Semarang ini diperkirakan mencapai sekitar 317 miliar rupiah.

Pencapaian **200** HARI KERJA
Kepala BPOM RI

KONFERENSI PERS

HASIL INTENSIFIKASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
ETIK ILEGAL DAN/ ATAU MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Jakarta, 30 Desember 2024



Selama Oktober hingga November 2024, BPOM berhasil menemukan 235 item kosmetik ilegal dan/atau berbahaya senilai lebih dari Rp8,91 miliar di 4 wilayah utama di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers yang digelar Senin (30/12/2024) mengatakan temuan ini menjadi gambaran nyata bahwa peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Wilayah Jawa Barat mencatatkan nilai temuan terbesar, yaitu Rp4,59 miliar, disusul Jawa Timur Rp1,88 miliar, Jawa Tengah Rp1,43 miliar, dan Banten Rp1,01 miliar.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Penguatan Penindakan

Kolaborasi Pengawasan Produk Ilegal

Berbagai kegiatan kolaborasi juga terus dilakukan untuk mengorkestrasi penguatan penindakan atas kejahatan obat dan makanan. Setidaknya ada 6 kegiatan termasuk pengungkapan kasus peredaran obat dan makanan ilegal. Selain itu, BPOM juga menggandeng Indonesian E-Commerce Association (iDEA) dan *marketplace* untuk memperkuat pengawasan produk ilegal di peredaran online.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi KAN ISO/IEC 17025:2017 kepada Laboratorium Forensik Digital BPOM

idEA
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Hasil Patroli Siber Bersama IDEA dan Marketplace

idEA Marketplace

MoU Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Pengungkapan Penjualan Kosmetik Ilegal

Laboratorium Forensik Digital BPOM Raih Predikat Sangat Baik pada Uji Profisiensi dari AFDI bekerjasama dengan BSN

Pengungkapan Jejaring Penjualan Obat Bahan Alam Ilegal dan Bahan Kimia Obat (BKO)

Penguatan Penindakan

Cegah Tangkal Ungkap Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Hingga Februari 2025, BPOM telah melakukan cegah tangkal produk ilegal melalui pemetaan 2108 data kerawanan kejahatan obat dan makanan 6 analisis kejahatan obat dan makanan, serta 5 kegiatan kolaborasi bersama pemangku kepentingan. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan menunjukkan tren peredaran produk ilegal di seluruh wilayah unit pelaksana teknis (UPT) BPOM.

Melalui pemantauan yang intensif, ditemukan berbagai jenis pelanggaran di setiap komoditas obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Data ini menjadi acuan penting bagi BPOM untuk mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan yang lebih efektif terhadap kejahatan obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat..

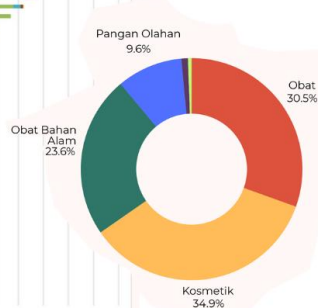
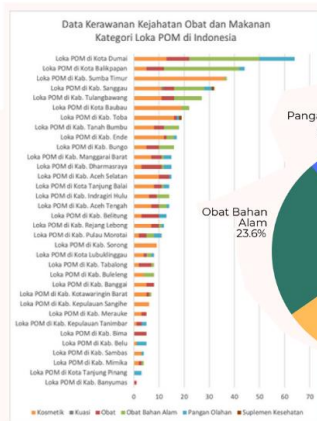
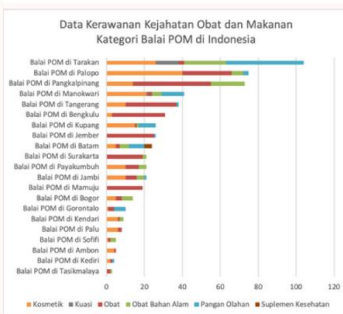
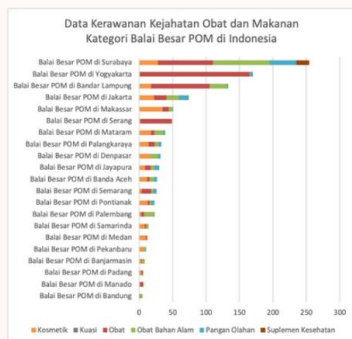
6

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

- Analisis Penyampaian Informasi Kewaspadaan Peredaran Obat Ilegal dan Palsu Berdasarkan Hasil Pengawasan BPOM dan Peringatan Otoritas Internasional
- Analisis Fenomena Penambahan Obat - Obat Tertentu (OOT) dalam Produk Obat Bahan Alam
- Analisis Penyalahgunaan Notifikasi Kosmetik: Modus, Dampak dan Strategi Penanggulangannya
- Analisis Struktur dan Penyebab Terjadinya Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung Bahan Kimia Obat di Indonesia
- Analisis Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Indonesia ke Luar Negeri
- Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia

2108

Data Kerawanan
Kejahatan Obat dan
Makanan



Analisis Fenomena Kejahatan Antisipasi Pelanggaran

Sebagai upaya pencegahan, BPOM juga menganalisis kejahatan obat dan makanan. Analisis didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan hasil pengawasan BPOM maupun otoritas internasional. Kajian dilakukan secara khusus per komoditi seperti obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan dan obat bahan alam (OBA) mengandung bahan kimia obat (OBA).

5

Penggalangan Pemangku Kepentingan

- Indonesia Korea Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation, 11 September 2024 - **MFDS South Korea**
- FGD Kolaborasi BPOM dan Perkosmi dalam Penanganan Perkosmi Kosmetik Ilegal di Peredaran, 23 September 2024 - **PERKOSMI**
- Penggalangan melalui Workshop Green Research and Opportunities with BPOM (GROW BPOM) Alternatif Formalin, 22 Oktober 2024 - **Balai POM di Bogor**
- Penggalangan Stakeholder dalam Produksi dan Pemanfaatan Obat dan Makanan yang Aman, Bermutu dan Berkhasiat, 4 November 2024 - **Balai POM di Samarinda**
- Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dengan Lintas Sektor di Wilayah Jawa Timur dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan, 12 November 2024 - **Lintas Sektor di Jawa Timur**

Grand Design Laboratorium

Launching Grand Design Penguatan Laboratorium

Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Untuk memperkuat fungsi ini, BPOM telah menyusun Grand Design Laboratorium Pengawasan sebagai fondasi pengembangan sistem pengawasan yang lebih modern dan responsif.

Grand design ini menekankan pentingnya integrasi jejaring laboratorium secara nasional, penerapan teknologi digital, serta pendekatan yang ramah lingkungan. Melalui langkah ini, laboratorium pengawasan diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika perkembangan produk, risiko kesehatan, dan tuntutan regulasi di era globalisasi.



Menurut Kepala BPOM, Laboratorium adalah jantung dari sistem pengawasan BPOM. Dengan penguatan yang dirancang dalam grand design ini, BPOM tidak hanya menjawab tuntutan masyarakat tetapi juga memperkuat peran Indonesia di kancah pengawasan internasional.



Kepala BPOM menegaskan bahwa pengawasan ATMPs bukan hanya soal keamanan dan mutu, tetapi juga tentang visi bangsa menghadapi masa depan pengobatan yang lebih canggih, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan.



Kepala BPOM memaparkan bahwa saat ini 65% obat yang digunakan secara global merupakan produk biologi, yang menandakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi dalam regulasi dan pengawasan. Forum tersebut menjadi platform untuk menggali masukan dari para ahli yang dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan ATMPs.

Dukungan BPOM terhadap ATMPs

BPOM mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghadapi tantangan pengawasan produk *Advanced Therapy Medicinal Products* (ATMPs). Langkah ini mencakup modernisasi fasilitas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan regulasi yang lebih adaptif. Laboratorium kini dilengkapi

instrumen berteknologi tinggi seperti Next Generation Sequencing (NGS), RT-PCR, flow cytometer, dan High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS), yang memungkinkan pengujian lanjutan terhadap produk ATMPs. Fasilitas pendukung lainnya meliputi ruang laboratorium dengan standar Biosafety Level (BSL) 2 dan 3, Laboratorium Hewan Uji, serta Ruang BioClean. Dengan penguatan ini, Laboratorium BPOM mampu memberikan dukungan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap produk ATMPs di Indonesia.

Simposium
Grand Design
Penguatan
Laboratorium

dalam mendukung Pengawa
Perkembangan Advanced Therapy M
(ATMPs) di Indonesia

8 Oktober 2024

Grand Design Laboratorium

Pengembangan Jejaring Laboratorium

Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) ditetapkan sebagai ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives pada sidang ke-19 Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG). Penetapan ini tidak hanya menjadi bukti kredibilitas Indonesia dalam pengawasan pangan, tetapi juga memperkuat peran strategis Indonesia dalam mendukung keamanan dan kualitas pangan bagi lebih dari 600 juta penduduk di kawasan ASEAN.

Dalam bidang obat bahan alam (OBA), BPOM mengembangkan Jejaring Laboratorium Pengawasan Obat Bahan Alam (JLPOBA) sebagai platform untuk berbagi informasi, memperluas cakupan pengawasan, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi. Melalui jejaring ini, dilakukan peningkatan kompetensi, harmonisasi metode analisis, dan pemastian mutu serta keamanan OBA secara lebih terintegrasi.

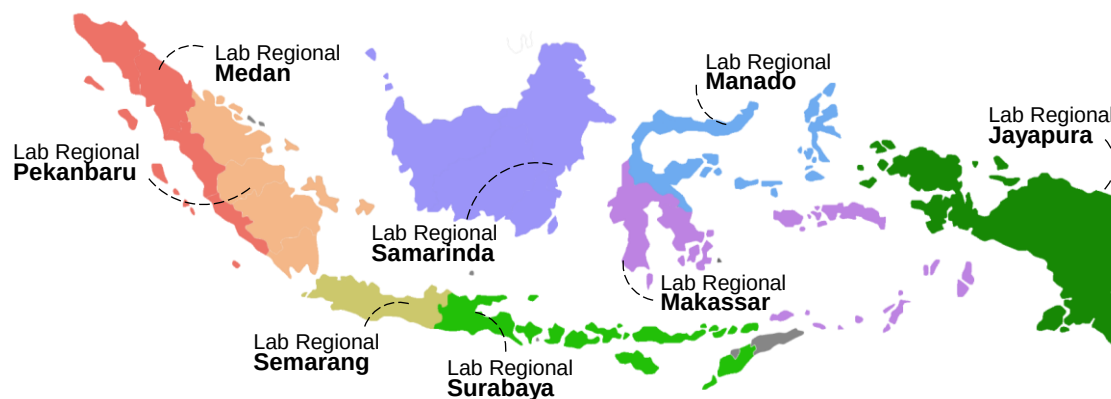
Sementara itu, di sektor kosmetik, BPOM menunjukkan komitmen penguatan pengawasan melalui pengembangan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI). Jejaring ini berfokus pada standarisasi metode pengujian yang sejalan dengan kualitas global, menjadikan BPOM sebagai institusi yang adaptif terhadap perkembangan industri kosmetik sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat referensi pengujian kosmetik di kawasan ASEAN.



Pengembangan Jejaring Laboratorium

Regionalisasi Laboratorium

Pada tahun 2025, BPOM memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah Indonesia Timur melalui pembentukan Laboratorium Regional Jayapura. Penambahan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM No. 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan POM, sehingga jumlah laboratorium regional kini menjadi delapan, yaitu Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado, dan Jayapura. Penyempurnaan sistem regionalisasi laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian secara lebih merata dan responsif, sesuai dengan tugas dan ruang lingkup pengawasan di masing-masing wilayah.



Grand Design Laboratorium

Pengembangan Metode Analisis Pengujian

Metode analisis (MA) merupakan prosedur sistematis yang dikembangkan oleh BPOM untuk menjamin keakuratan pengujian berbagai produk, seperti obat, NAPZA, obat tradisional, kosmetik, pangan, hingga produk biologi dan mikrobiologi. Seiring meningkatnya peredaran produk, kebutuhan pengawasan yang cepat dan andal juga semakin tinggi, terutama saat muncul isu terkait keamanan, khasiat, atau mutu. Dalam kondisi tertentu, metode analisis belum tersedia untuk kasus-kasus baru (emerging issues), sehingga diperlukan respons cepat dari BPOM dalam mengembangkan metode yang valid. Hasil pengujian yang tepercaya menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan strategis dan perlindungan kesehatan masyarakat.



Layanan Penyediaan Baku Pembanding untuk Pengujian

Layanan Baku Pembanding BPOM kini dilaksanakan secara digital melalui aplikasi INFALABS, yang memudahkan akses bagi pelanggan dan pelaku usaha. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan ini, tidak hanya karena kemudahan pemesanan, tetapi juga karena kualitas Baku Pembanding yang dihasilkan. Pengakuan terhadap kualitas ini dibuktikan dengan keterlibatan BPOM dalam pengembangan International Chemical Reference Substance (ICRS) bersama WHO pada tahun 2024, yang menunjukkan pengakuan di tingkat internasional.

Perbandingan Nilai SKM

Nilai SKM 2024

96.67

Nilai SKM 2023

95.73



Layanan Hewan Uji



Layanan Baku Pembanding Kimia



Layanan Uji Profisiensi



Layanan Kalibrasi Alat



Layanan Pengujian



Layanan Pelatihan Teknis Laboratorium



Layanan Penyediaan Baku Mikroba



Layanan Lot Release Vaksin

Grand Design Laboratorium

Pilot Project Rekognisi Laboratorium

Peran laboratorium eksternal sebagai penyedia fasilitas pengujian sangat penting dalam mendukung industri farmasi, khususnya dalam menjamin keamanan dan mutu produk. Namun, diperlukan verifikasi terhadap kapasitas dan kompetensi teknis laboratorium tersebut agar pengujian sediaan farmasi yang dilakukan sesuai dengan persyaratan kompendial yang berlaku. Untuk itu, BPOM melaksanakan pilot project rekognisi laboratorium eksternal sebagai upaya memastikan kesesuaian teknis dan mendorong kolaborasi pengujian yang andal guna memperkuat sistem pengawasan mutu obat di Indonesia.

PILOT PROJECT REKOGNISI LABORATORIUM

Pada tahun 2024 PPPOMN telah melaksanakan Pilot Project Rekognisi 4 laboratorium Eksternal, dan telah dilakukan kunjungan verifikasi ke laboratorium:

- PT. Clinisindo Laboratories
- PT. Saraswanti Indo Genetech (PT. SIG)
- Laboratorium Jasa Pengujian dan Penelitian (QLab) Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
- Laboratorium Pelayanan Pengujian Mutu Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Hasilnya setelah dievaluasi:

- 2 laboratorium yang memiliki **Predikat Baik** dengan tingkat **Maturitas level 3**
- 1 laboratorium memperoleh **Predikat Cukup** dengan tingkat **Maturitas level 2**
- 1 laboratorium memperoleh **Predikat Kurang** dengan tingkat **Maturitas level 1**



Memperkuat Peran Strategis BPOM

Kerja Sama Lintas Sektor

Sinergi untuk Ekosistem Uji Klinik Berkualitas dengan BRIN dan Kemenkes

BPOM menyelenggarakan forum lintas sektor bertema "A Blueprint for Innovation Success: Kualitas Sentra dan Pelaku Uji Klinik Optimal dalam Pencanangan dan Perwujudan Perjanjian Kerja Sama BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)." Forum ini menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen ketiga lembaga untuk meningkatkan mutu dan keamanan pelaksanaan uji klinik di Indonesia. Kegiatan ini merupakan

tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada 19 Juli 2024.

Sebagai langkah nyata, forum ini juga menandai peluncuran integrasi data uji klinik antara BPOM dan Indonesia Clinical Research Registry (INA-CRR) milik Kementerian Kesehatan, serta penyusunan *roadmap* kolaboratif sebagai panduan aksi bersama. Melalui sinergi ini, Indonesia bergerak menuju terbentuknya ekosistem uji klinik yang lebih kuat, berkualitas, dan mendukung kemajuan riset serta inovasi di bidang kesehatan.



Penandatanganan MoU dengan IPB

Penguatan kebijakan pengawasan obat dan makanan memerlukan kolaborasi lintas sektor antara berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan regulator. Perguruan tinggi berkontribusi melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pemerintah berperan dalam merumuskan regulasi yang efektif untuk memastikan pengawasan yang optimal.

Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, BPOM melakukan

penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Institut Pertanian Bogor (IPB University). Kerja sama ini menjadi fondasi baru bagi pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang obat dan makanan, serta menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret guna memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.





Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengadakan konferensi pers bersama di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (11/12/2024). Konferensi pers ini menunjukkan komitmen bersama antara BPOM dan Kejaksaan Agung dalam memperkuat langkah penindakan terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.

tanganan Nota Kesep AN KEMENTERIA



Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MoU) di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Selasa (26/11/2024). Nota kesepahaman ini berisi tentang koordinasi tugas dan fungsi kedua lembaga dalam mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan.



Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan audiensi dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko di Gedung BJ Habibie, Jakarta pada Selasa (10/12/2024). Dukungan BPOM terhadap pengembangan produk riset, termasuk zat baru yang digunakan dalam obat dan makanan menjadi penting. Hasil riset ini diharapkan akan menjadi produk yang memenuhi syarat untuk memperoleh izin edar dari BPOM.

ENANDATANGANA OTA KESEPA PO DENGAN DAN



Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menandatangani Nota Kesepahaman terkait Sinergitas Program Makan Bergizi Gratis pada Kamis (23/1/2025) di kantor BPOM.



Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa dan PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan di Desa dan Daerah Tertinggal pada Kamis (27/2/2025) di kantor Kemendesa dan PDT.

Kerja Sama Lintas Sektor

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN dan BIN

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPOM dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandai komitmen bersama dalam memperkuat keamanan informasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BPOM dan BSSN tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam implementasinya, keamanan siber dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan sinergi berkelanjutan antar lembaga, guna menjaga integritas data dan kelancaran operasional sistem informasi di lingkungan BPOM.

Selain itu, BPOM juga menjalin kerja sama strategis dengan Badan Intelijen Negara (BIN) melalui penandatanganan PKS mengenai Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber di Lingkungan BPOM. Sinergi antara BPOM, BSSN, dan BIN menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh, aman, dan terpercaya di era digital.

GERMAS SAPA Budayakan Hidup Sehat

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) merupakan program berbasis komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan pangan di sepanjang rantai pangan. Program terpadu ini mencakup sejumlah program yang telah lebih dulu diinisiasi BPOM yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman. Pelaksanaan intervensi dilakukan di sisi supply yaitu melalui kegiatan pendampingan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel dan sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki pemahaman yang baik terkait keamanan pangan.

Ketiga program Germas Sapa telah menghasilkan sejumlah capaian. Bahkan program terus diperluas seperti program Desa Pangan Aman dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal. Kick off program berlangsung di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, (14/10/2024).

Sinergi ini bertujuan untuk memastikan PMT Berbahan Pangan Lokal dapat memenuhi aspek keamanan, mutu dan gizi pangan dan juga memberdayakan usaha pangan di desa untuk memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik sehingga perekonomian masyarakat desa meningkat.



Supply Side



Peredaran:
Ritel Tradisional
(Pasar, Toko dan Warung)
Ritel Modern
(Mini Market, Sentra Oleh-Oleh, dll)



Pemberdayaan UMK Desa:
Pangan Segar
Pangan Olahan
Pangan Siap Saji

Demand Side



Pemberdayaan Masyarakat



Pemberdayaan Komunitas
Sekolah, Keluarga, Remaja



Kepala BPOM Taruna Ikrar menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan 19 perguruan tinggi sekaligus meluncurkan secara resmi program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC)-Merdeka Belajar Kampus Merdeka Platform Universitas, yang berlangsung di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Senin (9/12/2024).



Pencapaian 200 HARI KERJA
Kepala BPOM RI



PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA



PENANDATANGANAN
KEPAJARAN - BPOM

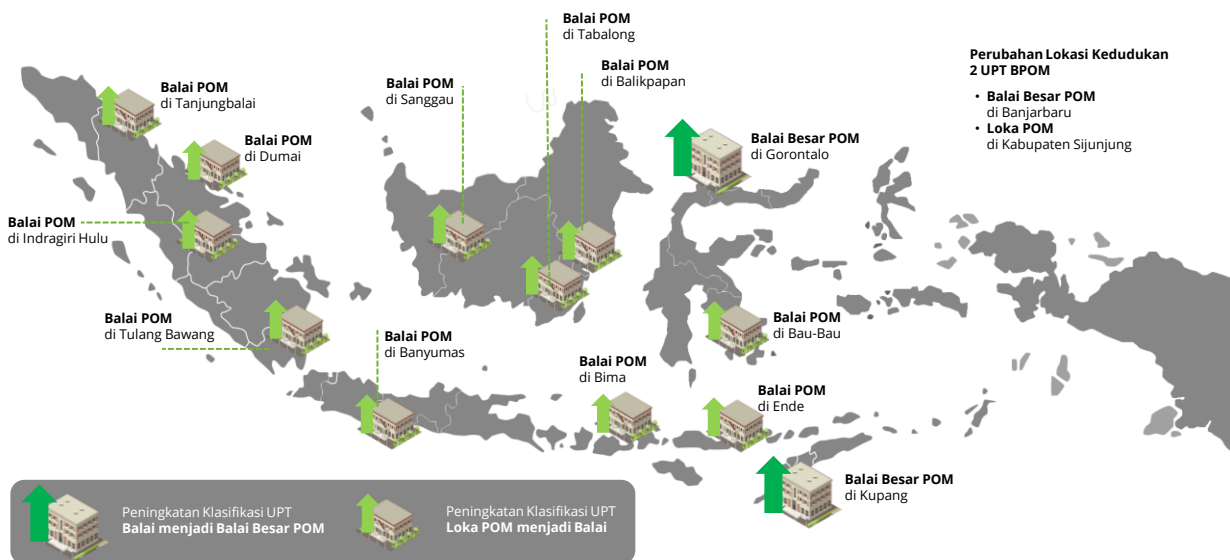
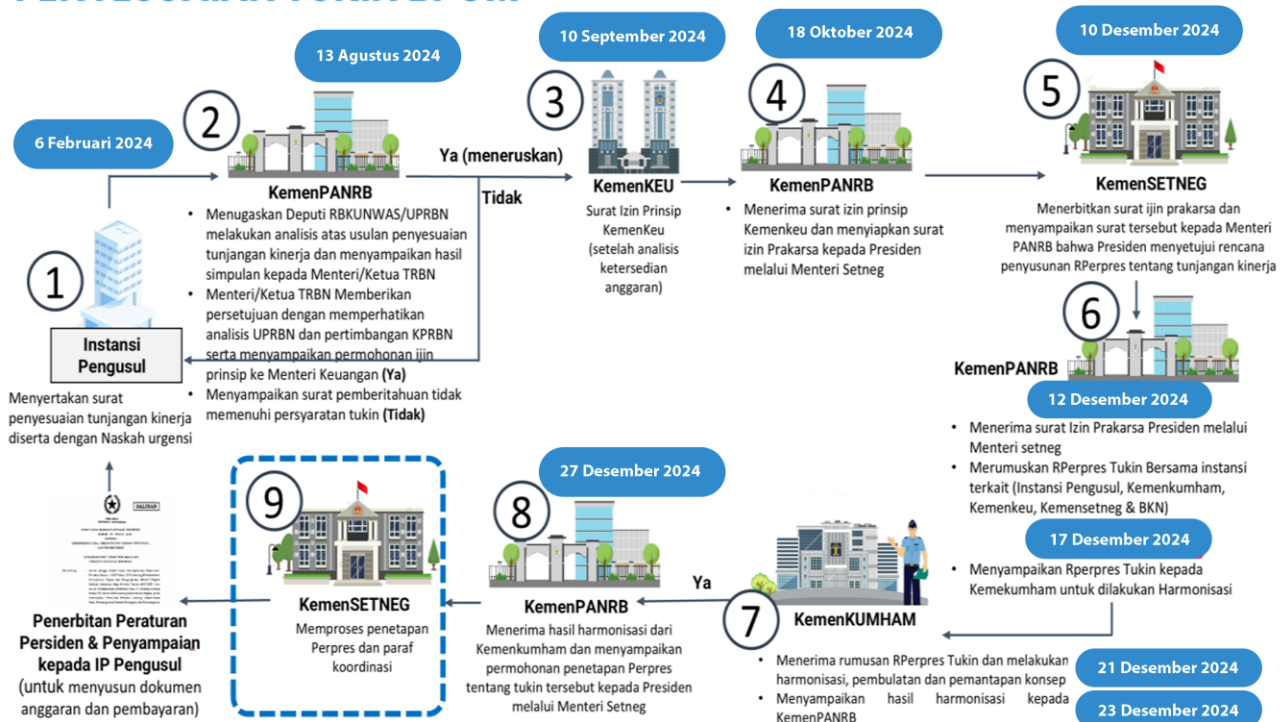


BPOM dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru saja menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Pesantren di Bidang Obat dan Makanan. Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf secara resmi merilis kerja sama tersebut di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (14/5/2025).



Dukungan Manajemen

PROGRES PENGUSULAN PENYESUAIAN TUKIN BPOM



Dukungan Manajemen

**Agu
2024**

STRATEGI KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN SDM DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI EKONOMI SIRKULAR



KEPALA BPOM TARUNA IKRAR:
KONSEP KEPEMIMPINAN DI BPOM
MELIBATKAN PENDEKATAN **NEURO-LEADERSHIP**,
YANG MENEKANKAN **PENTINGNYA KESEHATAN OTAK**
DALAM MEMBENTUK PEMIMPIN YANG EFEKTIF



Pendidikan Lanjutan dan Pengembangan Kompetensi Global BPOM

BPOM terus menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Education Expo dan Training on Active Pharmaceutical Ingredient (API), yang bertujuan membekali SDM dengan wawasan dan keterampilan sesuai standar internasional, sekaligus memperkuat peran BPOM dalam pengawasan obat dan makanan di tingkat global.

Strategi Kepemimpinan dan Manajemen SDM dalam Kerangka Implementasi Ekonomi Sirkular

BPOM mengadopsi konsep kepemimpinan yang mengintegrasikan pendekatan neuro-leadership. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesehatan dan fungsi otak dalam membentuk pemimpin yang efektif, adaptif, dan mampu mengambil keputusan strategis secara berkelanjutan. Melalui pemahaman mekanisme kerja otak, BPOM mendorong pengembangan kepemimpinan yang mendukung transformasi organisasi menuju implementasi ekonomi sirkular secara optimal.

**Agu
Sep
2024**

PENDIDIKAN LANJUTAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI GLOBAL BPOM

UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI GLOBAL PEGAWAI BPOM, SEJUMLAH KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TELAH DILAKSANAKAN. SEPERTI **EDUCATION EXPO & TRAINING ON ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENT (API)**



**Badan POM
Education Expo**
19 -20 Agustus 2024



**Training on Active
Active Pharmaceutical
Ingredient (API)**

16-20 September 2024

Dukungan Manajemen

BPOM turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia

BPOM turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang kefarmasian. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui pemberian pembekalan kepada calon apoteker melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini direncanakan berlangsung pada bulan September dan Desember 2024, sebagai upaya mendukung pengembangan kompetensi profesional apoteker sebelum terjun ke dunia kerja.

Pengembangan Kompetensi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

BPOM terus berupaya meningkatkan kompetensi pengawas pangan daerah dalam rangka mendukung keamanan pangan dan daya saing UMKM. Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior, yang bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pengawasan pangan yang efektif dan berbasis risiko.

Okt
2024

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DAERAH

PPSDM POM TERUS MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGAWAS PANGAN DAERAH UNTUK **MENDUKUNG KEAMANAN** DAN **DAYA SAING UMKM PANGAN** MELALUI PELATIHAN **PENYULUH KEAMANAN PANGAN (PKP) PERTAMA** DAN **DISTRICT FOOD INSPECTOR (DFI) JUNIOR**

Sep
Des
2024

BADAN POM BERKONTRIBUTSI DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

BADAN POM **MEMBERIKAN PEMBEKALAN KEPADA CALON APOTEKER** MELALUI **KEGIATAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)**, PADA BULAN **SEPTEMBER & DESEMBER 2024**



Dukungan Manajemen

Dialog Kepala BPOM dan Leader Dialogue

Dalam rangka memperkuat budaya kerja BerAKHLAK, Kepala BPOM mengadakan dialog bersama para Agen Perubahan di lingkungan BPOM untuk mendorong pertukaran pengalaman dalam menginternalisasikan nilai-nilai inti BerAKHLAK serta memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola organisasi yang berintegritas. Sebagai kelanjutannya, BPOM juga menyelenggarakan kegiatan Leader Dialogue dengan tema Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membangun Budaya BerAKHLAK di Lingkungan BPOM. Acara ini diikuti oleh 461 peserta. Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber utama Bapak Rahmat Ismail, seorang psikolog senior, yang memberikan wawasan penting terkait penguatan budaya kerja yang sehat dan beretika di lingkungan BPOM.

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM POM melalui Sertifikasi

BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam pengawasan obat dan makanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Sertifikasi SDM POM, yang bertujuan memperkuat peran dan kompetensi personel pengawas, khususnya Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Inspektur Pangan. Program ini dirancang untuk memastikan SDM POM memiliki standar keahlian yang andal, guna mendukung pengawasan yang efektif dan berdaya saing.

Des
2024

PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POM MELALUI SERTIFIKASI

BPOM BERKOMITMEN MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SDM DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.

SALAH SATUNYA MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI SDM POM. SERTIFIKASI INI BERTUJUAN UNTUK MEMPERKUAT PERAN SDM POM, Khususnya bagi para Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Inspektur Pangan

339 total peserta

181	PKP PERTAMA
158	DFI JUNIOR

Okt
2024

DIALOG KEPALA BPOM DENGAN AGEN PERUBAHAN: MEMBANGUN BUDAYA BerAKHLAK

UNTUK MEMPERKUAT BUDAYA KERJA BERAKHLAK, KEPALA BPOM MENGADAKAN DIALOG DENGAN PARA AGEN PERUBAHAN BADAN POM.

ACARA INI BERTUJUAN UNTUK BERBAGI PENGALAMAN ANTAR AGEN PERUBAHAN DALAM MENGINTERNALISASIKAN NILAI-NILAI INTI BerAKHLAK DI LINGKUNGAN BPOM.



Feb
2025

LEADER DIALOGUE: KESEHATAN JIWA, RAGA, DAN HARTA DALAM MEMBANGUN BUDAYA BERAKHLAK DI LINGKUNGAN BPOM

SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN BUDAYA BERAKHLAK DI LINGKUNGAN BPOM,

PPSDM POM MENGADAKAN KEGIATAN LEADER DIALOGUE DENGAN TEMA KESEHATAN JIWA, RAGA, DAN HARTA DALAM MEMBANGUN BUDAYA BERAKHLAK DI LINGKUNGAN BPOM.



Dukungan Manajemen

Kunjungan Sekolah atau Universitas ke Lingkungan BPOM Pusat

BPOM membuka kesempatan bagi sekolah atau universitas untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BPOM melalui kegiatan kunjungan ke institusi ini. Pada periode September hingga Desember 2024, BPOM telah menerima kunjungan dari berbagai perwakilan mahasiswa dan pelajar, antara lain dari BEM UNPAD, UI, UIN Jakarta, SMP Garuda Cendekia Jakarta, BEM FMIPA UI, serta Poltekkes Banten, dengan total peserta sebanyak 256 orang yang terdiri dari siswa dan pendamping. Selanjutnya, pada Januari 2025, BPOM kembali menerima kunjungan dari SMK Wicaksana Hikmah dan Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, yang diikuti oleh 161 peserta dengan peminatan Rumah Sakit serta Obat dan Farmasi.

Penilaian Kompetensi Melalui Perbandingan Antara Capaian Kompetensi Pegawai dan Persyaratan Dengan Standar Kompetensi

Untuk mengidentifikasi SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi, dilakukan penilaian kompetensi dengan membandingkan capaian kompetensi pegawai terhadap persyaratan standar yang ditetapkan. Pada periode Januari hingga Maret 2025, kegiatan penilaian kompetensi meliputi pemetaan kompetensi di berbagai unit. Kegiatan ini diikuti oleh 199 pegawai dan dilaksanakan secara daring. Selain itu, dilakukan juga Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF PFM) Batch 1 Tahun 2025 yang diikuti oleh 107 pegawai.

Pemetaan Kompetensi

199
pegawai
secara online

**Jan
Mar
2025**

PENILAIAN KOMPETENSI
MELALUI PERBANDINGAN
ANTARA NILAI CAPAIAN
KOMPETENSI PEGAWAI
DAN PERSYARATAN DENGAN
STANDAR KOMPETENSI

UNTUK MENGIDENTIFIKASI SDM BADAN POM
YANG MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI
DILAKUKAN KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI.

Uji Kompetensi
JF PFM Batch 1

107

orang pegawai

**Des
2024**

KUNJUNGAN SEKOLAH ATAU UNIVERSITAS KE LINGKUNGAN BPOM PUSAT

BPOM MEMBUKA KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGENAL LEBIH DEKAT BADAN POM MELALUI KEGIATAN KUNJUNGAN KE BPOM.



Periode Sep-Des 2024

256
orang berkunjung

BEM UNPAD
Universitas Indonesia
UIN Jakarta
SMP Garuda Cendekia Jakarta
BEM FMIPA UI
Poltekkes Banten

**Jan
Mar
2025**

KUNJUNGAN SEKOLAH ATAU UNIVERSITAS KE LINGKUNGAN BPOM PUSAT

BPOM MENERIMA KUNJUNGAN DARI SMK WICAKSANA HIKMAH DAN AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YOGYA YANG TERDIDI DARI PEMINATAN RUMAH SAKIT SERTA PEMINATAN OBAT DAN FARMASI



Total Peserta

161
orang

SMK Wicaksana Hikmah
dan
Akademi Manajemen
Administrasi Yogya

Dukungan Manajemen

Pengembangan Kompetensi Dalam Negeri (Pelatihan Fungsional dan Teknis)

Pada periode Januari hingga Maret, telah diselenggarakan tiga pelatihan, yaitu Pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar, Pelatihan Penyuluh Obat dan Makanan, serta Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI). Pelatihan ini ditujukan bagi asesor kompetensi, widyaiswara, dan pengawas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

IELTS Prediction Test untuk Peningkatan SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Berdaya Saing Global

Prediction Test ini merupakan bentuk dukungan bagi pegawai yang akan mengikuti studi atau pelatihan di luar negeri. Pada bulan Februari, BPOM menyelenggarakan kegiatan IELTS Prediction Test sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas SDM Pengawas Obat dan Makanan yang kompetitif secara global. Tes ini diikuti oleh 100 pegawai, dengan 54 peserta dari unit pusat yang melaksanakan tes secara luring, dan 46 peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengikuti tes secara daring.

Feb
2025

IELTS PREDICTION TEST UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YANG BERDAYA SAING GLOBAL

PREDICTION TEST INI MERUPAKAN
BENTUK DUKUNGAN BAGI PEGAWAI
YANG AKAN MELAKSANAKAN STUDI
ATAU PELATIHAN DI LUAR NEGERI.

100 orang
peserta



Jan
Mar
2025

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM NEGERI (PELATIHAN FUNGSIONAL DAN TEKNIS)

DALAM PERIODE JANUARI HINGGA MARET
TELAH DISELENGGARAKAN 3 PELATIHAN,
DIANTARANYA PELATIHAN FOOD INSPECTOR
TINGKAT DASAR, PELATIHAN PENYULUH
OBAT DAN MAKANAN, & PELATIHAN PENYULUH
KEAMANAN PANGAN (PKP) PERTAMA DAN
DISTRICT FOOD INSPECTOR (DFI)

BAGI ASESOR KOMPETENSI DAN WIDYAISWARA,
PENGAWAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA



FI DASAR
BATCH 1 & 2

79
orang

Penyuluh
Obat & Makanan
Dasar

40
orang



PELATIHAN
PKP-DFI

39
orang

Dukungan Manajemen

Penerbitan Jurnal Eruditio

Pada Januari 2025, PPSPM POM menerbitkan edisi terbaru Jurnal Eruditio Vol. 5 No. 1, dengan Kepala BPOM sebagai Penanggung Jawab. Dikelola sejak 2020, jurnal ini telah menerbitkan 9 edisi dan 59 artikel yang berfokus pada isu keamanan obat dan pangan, didukung oleh tim editorial serta mitra bestari dari berbagai universitas terkemuka. Sebagai bagian dari peningkatan mutu, Eruditio berhasil meraih akreditasi SINTA peringkat 5 pada 2024. Hingga 24 Maret 2025, jurnal ini telah dikunjungi lebih dari 14.000 pembaca dan mencatatkan 129 sitasi serta indeks-h sebesar 6 di Google Scholar, menunjukkan kontribusi signifikan sebagai referensi ilmiah di bidangnya.

Jan
Mar
2025

PENERBITAN
JURNAL ERUDITIO:
MENINGKATKAN
KUALITAS ILMIAH DI BPOM

PADA BULAN JANUARI 2025,
PPSPM POM BERHASIL MENERBITKAN
EDISI TERBARU DARI JURNAL
ERUDITIO VOL. 5, NO. 1,
DENGAN KEPALA BPOM SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB

14.245 online
visitor

129 kutipan
google scholar

6 kutipan
indeks-h



Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

BPOM menyelenggarakan kegiatan tahunan Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Forkon). Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kebijakan pengawasan obat dan makanan di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin kompleks. Melalui Forkon, BPOM menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, dan pelaku industri, guna mengidentifikasi topik-topik kajian yang relevan dan prioritas. Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta penerapan standar analisis kebijakan yang diakui secara internasional, demi menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan memperkuat kredibilitas BPOM di tingkat nasional maupun global.



Pengukuran kepatuhan pelaku
usaha

01



Pengukuran kesadaran
masyarakat terhadap keamanan
dan mutu obat dan makanan

02



Survei profil produk (obat, obat
tradisional, obat kuasi dan
suplemen kesehatan) yang
beredar

03



Analisis efektivitas implementasi
regionalisasi laboratorium
pengujian pangan olahan, obat
tradisional, suplemen kesehatan
dan kosmetik

04

Dukungan Manajemen

Interoperabilitas Data Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM mengimplementasikan interoperabilitas data dengan sejumlah kementerian dan lembaga melalui portal Satu Data BPOM untuk mendukung pertukaran dan integrasi data pengawasan obat dan makanan. Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, mencakup pertukaran data uji klinik, data balik Kamus Farmasi & Alat Kesehatan (KFA) pada platform Satu Sehat, data efek samping, informasi sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF), serta data harga netto apotek (HNA) dan harga eceran tertinggi (HET). Interoperabilitas ini mendukung efisiensi, akurasi, dan otomatisasi proses tanpa perlu pengisian data berulang.

BPOM juga mengintegrasikan data keamanan vaksin dari Web Keamanan Vaksin dan data efek samping obat tuberkulosis dari aplikasi SITB. Di lingkungan internal, pertukaran data antar-unit dan UPT juga dioptimalkan. Pengolahan data dilakukan oleh Pusdatin, dengan kontribusi seluruh unit teknis, yang hasilnya ditampilkan melalui Badan POM Command Center (BCC) sebagai pusat informasi strategis terintegrasi.



Implementasi BPOM Command Center (BCC)

BPOM Command Center (BCC) merupakan sistem informasi strategis yang menyajikan dashboard interaktif dan dapat diakses secara nasional. Berlokasi di Kantor Pusat BPOM, BCC dibangun untuk mendukung kebutuhan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis BPOM secara komprehensif dan real-time.

Dashboard BCC menampilkan data dan informasi strategis yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) sebagai unit pengelola sistem. Pengembangan BCC ini sejalan dengan inisiatif Satu Data BPOM, yang mendukung implementasi Satu Data Indonesia, dengan menggunakan repositori data terstandar melalui Data Lake BPOM sebagai sumber utama.



Dukungan Manajemen

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM merupakan bagian integral dari pelaksanaan SPBE nasional. Badan POM telah menetapkan Arsitektur SPBE melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 217 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE di Lingkungan Badan POM yang ditetapkan pada 16 Agustus 2024.

Selaras dengan prinsip SPBE yang berorientasi pada layanan terpadu dan berfokus pada pengguna, BPOM menargetkan pengembangan portal layanan terpusat. Portal ini akan mencakup berbagai fitur seperti pencarian produk, pengaduan, pengecekan nomor registrasi, serta pelaporan pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan Arsitektur To Be yang telah dirancang pada tahun 2024.



BPOM Peringkat 1
Kategori Lembaga
Nilai SPBE BPOM
4.53

(Naik 0.45 dari 2023)

Penilaian Tahun 2024: Agustus - Oktober

Penilaian Indeks SPBE dilakukan dalam **2 tahap**:
1. Penilaian Mandiri (Pengisian LKE)
2. Evaluasi oleh KemenpanRB

Penerapan ISO

BPOM berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar internasional ISO/IEC. Komitmen ini diwujudkan melalui perolehan dan penerapan empat sertifikasi ISO, yaitu:

BPOM mengintegrasikan standar-standar tersebut dalam pengelolaan TIK secara menyeluruh. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan audit surveilans, baik internal maupun



1. **ISO/IEC 27001:2022**
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2. **ISO/IEC 20000-1:2018**
Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi
3. **ISO 37001:2016**
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
4. **ISO 9001:2015**
Sistem Manajemen Mutu

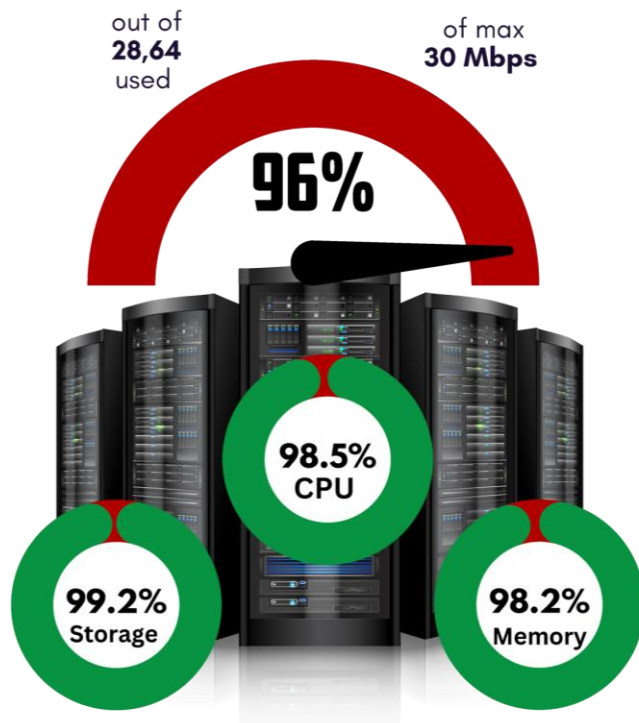
eksternal, untuk ISO/IEC 20000-1:2018 dan ISO/IEC 27001:2022. Hasil audit menunjukkan bahwa BPOM berhasil mempertahankan kedua sertifikasi tersebut, mencerminkan konsistensi dalam penerapan sistem manajemen layanan dan keamanan informasi yang efektif.

Dukungan Manajemen

Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data

Sebagai bentuk dukungan terhadap mandat Presiden dalam percepatan transformasi digital serta implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), BPOM telah sepenuhnya memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. BPOM menjadi salah satu kementerian/lembaga (K/L) pionir yang berhasil melakukan migrasi 100% sistem informasi dan aplikasi dari pengelolaan mandiri ke layanan PDN, sebagai langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan infrastruktur TIK nasional.

Sebagai tindak lanjut dalam memperkuat implementasi SPBE, BPOM juga mengadopsi Jaringan Intra Pemerintah sebagai penghubung utama antara BPOM dan PDN Kementerian KOMINFO. Layanan ini mendukung konektivitas yang lebih aman dan andal, serta memastikan kelancaran operasional sistem informasi secara terintegrasi.



Indeks Tata Kelola Pengadaan BPOM

Model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 aspek yaitu kelembagaan, SDM, proses, dan sistem informasi. Hasilnya nilai kematangan UKPBJ BPOM telah mencapai angka maksimal yakni 40,00 sejak 2022. Hal ini tak terlepas dari kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ yang menduduki posisi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/jasa). Selain itu, pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

SDM PBJ Handal

Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM Tahun 2024 adalah

20.15

Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Nilai 25.00 (2022)

**Naik 27.00
(2025)**

- Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
- e-Tendering
- e-Purchasing
- Toko Daring
- Non e-Tendering
- Non e-Purchasing
- e-Kontrak

Dukungan Manajemen

Pengadaan Reagensia Pengujian

Laboratorium merupakan backbone pengawasan obat dan makanan. Untuk itu penyediaan reagen baku pembanding menjadi sangat krusial guna memberikan kelancaran dalam proses pengujian di laboratorium. Karena itu, BPOM melakukan konsolidasi reagensia untuk mendukung ketersediaan reagen.



Acetonitrile HPLC: digunakan dalam HPLC sebagai pelarut untuk uji kandungan zat adiktif, identifikasi metabolit, analisis sediaan obat, uji residu pestisida, identifikasi kontaminan, dan analisis kandungan nutrisi.



Methanol HPLC: digunakan dalam HPLC sebagai pelarut berbagai senyawa untuk menganalisis kadar zat aktif dalam obat seperti parasetamol, atau analisis kandungan asam salisilat dalam kosmetik seperti krim anti jerawat.



Ethanol Absolute For Analysis: digunakan untuk melarutkan bahan kimia dalam obat (bahan aktif & bahan tambahan) maupun kontaminan yang penting dalam proses ekstraksi, pemurnian, dan analisis senyawa dalam sampel obat.



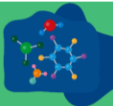
Chloroform For Analysis: digunakan untuk mempelajari struktur dan sifat senyawa organik, memisahkan dan mengidentifikasi komponen campuran, dan mengukur kandungan lipid dalam suatu sampel.



Hydrochloric Acid For Analysis 37%: digunakan untuk melarutkan sampel obat dan makanan, terutama sampel padat seperti tablet, kapsul dalam pengujian kualitas produk.



Nitric Acid For Analysis 65%: digunakan untuk melarutkan dan memecah sampel obat dan makanan agar dapat dianalisis lebih lanjut dan analisis kuantitatif.



Ethanol Absolute For Analysis: digunakan untuk melarutkan zat kimia dalam proses ekstraksi, pemisahan, dan pengukurannya.



n-Hexane: digunakan untuk mengekstraks senyawa non-polar, seperti minyak nabati serta untuk menguji toksisitas senyawa dalam sampel obat dan makanan.



BAB III. DUKUNGAN BPOM MEWUJUDKAN UMKM BERDAYA SAING

Dukungan BPOM Mewujudkan UMKM Berdaya Saing

Dukungan BPOM Terhadap UMKM Bagi Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Melalui platform IDEAS (Integrated Development and Training Information System), pelaku usaha dapat mengakses berbagai modul pelatihan dan program pengembangan kompetensi secara digital. BPOM meyakini bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha tidak hanya berkontribusi pada terciptanya produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tetapi juga secara signifikan meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasar nasional maupun global.

Teman UMKM Kosmetik

Program TEMAN UMKM Kosmetik digagas sebagai respons atas tingginya temuan pelanggaran penandaan kosmetik. Program ini memiliki 2 pendekatan pembinaan. Pertama pembinaan on site oleh petugas dengan melakukan pemeriksaan rutin di sarana. Kedua pembinaan event biasanya berupa bimbingan teknis. Tujuannya mampu berkontribusi terhadap kenaikan persentase kosmetik memenuhi ketentuan penandaan.

Jan
Mar
2025

DUKUNGAN BPOM TERHADAP UMKM BAGI PELAKU USAHA OBAT DAN MAKANAN

MELALUI IDEAS PELAKU USAHA DAPAT
MENGAKSES BERBAGAI MODUL
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI.

BPOM PERCAYA **PENINGKATAN
KOMPETENSI PELAKU USAHA**
TIDAK HANYA BERDAMPAK PADA
PENINGKATAN KUALITAS PRODUK
YANG AMAN, BERMUTU, DAN BERKHASIAT,
TETAPI JUGA AKAN **SECARA SIGNIFIKAN
MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK
OBAT DAN MAKANAN INDONESIA**
DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN GLOBAL.



Peluncuran Program TEMAN UMKM KOSMETIK

Intensifikasi Pembinaan Penandaan

Pencapaian

200

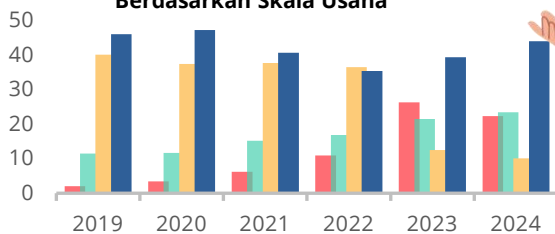
HARI KERJA
Kepala BPOM RI

Dukungan BPOM Mewujudkan UMKM Berdaya Saing

Pendampingan Registrasi Pangan Olahan

Pendampingan registrasi pangan olahan terus dilakukan melalui program jemput bola yang terdiri atas sosialisasi, bimtek, coaching dan desk registrasi, baik secara daring dan luring. Hingga saat ini data menunjukkan persentase izin edar pangan olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar.

Presentase Izin Edar Pangan Olahan Berdasarkan Skala Usaha



Mikro	2.07%	3.47%	6.26%	11.00%	26.39%	22.40%
Kecil	11.57%	11.68%	15.22%	16.93%	21.59%	23.50%
Menengah	40.23%	37.48%	37.76%	36.61%	12.54%	10.10%
Besar	46.13%	47.36%	40.76%	35.47%	39.48%	44.10%

Pendampingan telah dilakukan terhadap 2318 pelaku usaha selama tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, telah terbit 3406 Izin Edar/PB-UMKU dari proses pendampingan registrasi pangan olahan. Pendampingan yang telah diberikan diharapkan dapat mempercepat pelaku usaha mendapatkan izin edar sehingga dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha terutama usaha mikro kecil.



Masalah yang dihadapi UMKM

- Kurangnya pemahaman UMKM terhadap persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label
- Gagap teknologi dalam menggunakan aplikasi
- Masih lamanya UMKM memenuhi kekurangan data persyaratan registrasi

Tujuan Pendampingan UMKM

- Mempercepat proses registrasi hingga mendapatkan Izin Edar
- Mendukung pengembangan dan meningkatkan daya saing, terutama untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- Memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi
- Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pelaku usaha
- Mengurangi kesalahan dalam pengajuan dokumen



Capaian Pendampingan 2024

No	Skala Usaha	Jumlah
1.	Persetujuan Akun Perusahaan	925
2.	Aju produk yang berproses	2436
3.	Izin Edar/PB-UMKU	3406

Hasil Pendampingan 2024

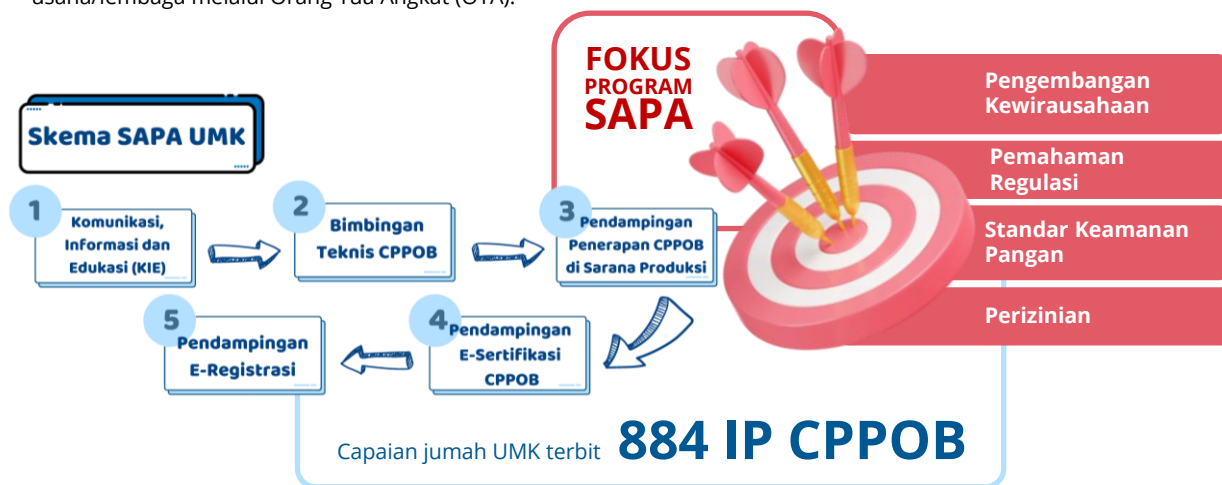
No	Skala Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Mikro	1485	64,06%
2.	Kecil	473	20,41%
3.	Menengah	139	6,00%
4.	Besar	198	8,54%
5.	Importir	23	0,99%



Dukungan BPOM Mewujudkan UMKM Berdaya Saing

Pemberdayaan UMK-SAPA

Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan berperan strategis dalam menyediakan pangan aman dan berkualitas serta mendorong perekonomian lokal. Untuk meningkatkan daya saing UMK, BPOM menginisiasi program SAPA (Sadar Pangan Aman) UMK. Program ini berkolaborasi dengan stakeholder, termasuk perguruan tinggi melalui SAPA KAMPUS dan pelaku usaha/lembaga melalui Orang Tua Angkat (OTA).



Pemberdayaan UMKM – Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan

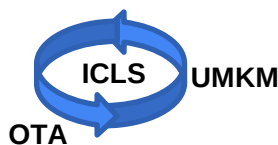
BPOM meluncurkan Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK pangan olahan untuk berkolaborasi bersama mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kecil. Program ini mengadopsi 2 pendekatan yakni inclusive closed loop system dan one way system. Hingga saat ini tercatat 27 industri terlibat sebagai OTA.

Badan POM meluncurkan Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK Pangan Olahan. Program ini bertujuan untuk:

- Membantu UMK pangan olahan mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam menyediakan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.
- Meningkatkan daya saing serta kemandirian UMK di bidang pangan olahan.
- Memperkuat komitmen pelaku industri pangan olahan dan *stakeholder* lainnya dalam membina dan mendukung UMK pangan olahan.

BENTUK KEGIATAN OTA

PERMODALAN
PENYULUHAN
PENDAMPINGAN
MAGANG
PEPRALATAN PRODUKSI
PROMOSI DAN PEMASARAN



Inclusive Closed Loop System

Model sistem lingkaran tertutup, OTA memberikan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh anak angkat berupa: modal, bahan baku maupun peralatan untuk diproses atau diproduksi menjadi produk antara yang merupakan bahan baku bagi Industri Orang Tua Angkat.



One Way System

Bersifat satu arah, orang tua angkat menyalurkan atau mengalokasikan sebagian program Corporate Social Responsibility sebagai hibah kepada UMK angkat, tidak ada timbal balik.





BAB IV.

PENGUATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Indeks RB BPOM Tahun 2024

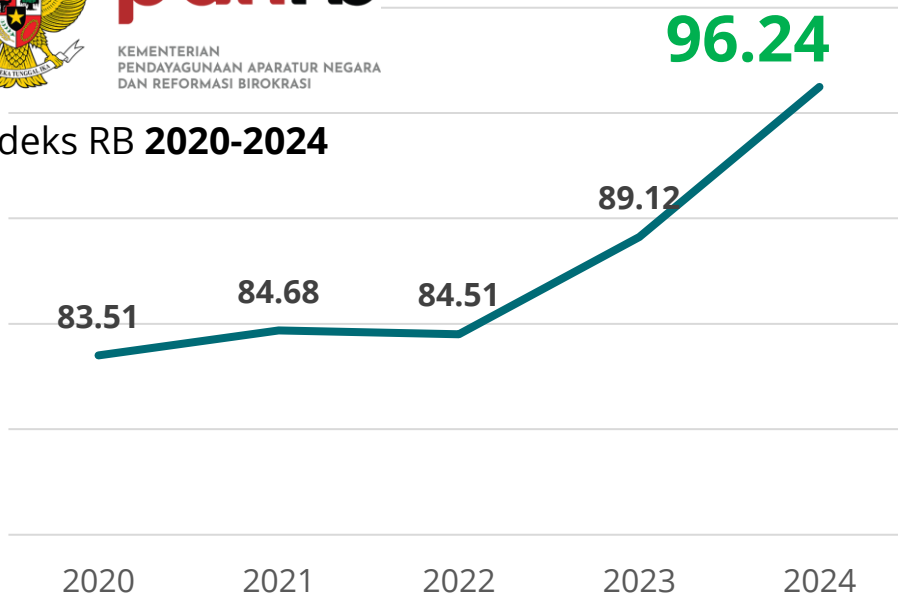
Sejak tahun 2011, BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi (RB) melalui berbagai upaya perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup penyederhanaan struktur birokrasi, percepatan layanan publik, serta penerapan kebijakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja. Komitmen ini dibuktikan melalui peningkatan skor Indeks Reformasi Birokrasi BPOM, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Indeks RB 2020-2024



400 Indeks Sistem Merit	37 Unit Kerja WBK/WBBM
82.04 Nilai SAKIP	5 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
4.91 Indeks Pelayanan Publik	77.8 Indeks BerAKHLAK
99.81 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	5 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
4.53 Indeks SPBE	
93.47 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Pelaporan LHKAN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara)

LHKPN Periodik Tahun 2024 dengan hasil total Wajib Laporkan (WL) untuk penyampaian LHKPN BPOM tahun 2024 sesuai aplikasi e-LHKPN KPK sebanyak 5.305 (lima ribu tiga ratus lima) WL. Sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 ASN BPOM telah melaporkan 100% LHKAN.

Kewajiban Penyampaian LHKAN

Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-Pl.06.09.2.02.25.84 tanggal 5 Februari 2025 tentang Pemberitahuan Kewajiban dan Batas Waktu Penyampaian LHKAN Periodik Tahun 2024

Monitoring Kepatuhan Penyampaian LHKPN



Cafe Integritas Series 4

BPOM menyelenggarakan Café Integritas Seri 4 dengan tema “Judi Online di Kalangan ASN: Tinjauan Aspek Hukum dan Strategi Pencegahannya.” Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang bahaya judi online serta memperkuat kontribusi mereka dalam menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran BPOM semakin sadar akan risiko hukum dan sosial dari judi online, serta mampu menjaga diri dari potensi kecanduan yang dapat merusak integritas pribadi dan institusi.

Inspektorat Utama melakukan monitoring

Wajib Laporkan (WL) LHKPN BPOM Tahun 2024 sebanyak

5.305 WL

100% Telah Melapor
(sampai dengan 21 maret 2025)



“Judi Online di Kalangan ASN: Tinjauan Aspek Hukum dan Strategi Pencegahannya.”

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Digitalisasi Pengawasan Intern

BPOM terus meningkatkan efektivitas pengawasan intern melalui integrasi sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko. Aplikasi SIMAKIN (pengelolaan kinerja individu) kini terhubung dengan SAPA APIP (pelaporan manajemen risiko), sehingga profil risiko unit kerja seperti kode risiko dan langkah mitigasinya dapat langsung muncul dalam sistem kinerja. Selain itu juga dikembangkan modul manajemen risiko SAPA APIP dengan fitur baru, seperti identifikasi isu internal-eksternal, pengujian efektivitas pengendalian risiko tinggi, dan pengelolaan risiko eskalasi.

Di sisi lain, karena efisiensi anggaran, BPOM tidak lagi melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu eksternal (ISO) pada 2025. Sebagai gantinya, audit internal akan mengacu pada dokumen manual mutu pengawasan obat dan makanan yang tengah disempurnakan, serta sistem pelaporannya dalam SAPA APIP juga disesuaikan. Selain itu, BPOM mulai menerapkan konsep Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) dengan memanfaatkan dashboard baru dalam aplikasi BCC (BPOM Command Center). Visualisasi ini membantu memetakan bottleneck proses, memperjelas posisi kinerja UPT, dan menjadi langkah awal menuju sistem pengawasan berbasis data real-time yang lebih transparan dan responsif.

DIGITALISASI PENGAWASAN INTERN



Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan 15 Aksi Stranas PK untuk periode 2025–2026. BPOM berperan aktif dalam dua fokus rencana aksi, yaitu Penguatan Tata Kelola Impor dan Digitalisasi.

Perbaikan tata kelola impor, khususnya di sektor pertanian, industri, dan kesehatan, terus didorong sebagai langkah pencegahan korupsi yang sistematis. Di sektor kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Lembaga National Single Window (LSNW) bersinergi mengembangkan integrasi sistem, yaitu SSm Perizinan (LSNW), e-Pharm (Kementerian Kesehatan), dan Exim (BPOM). Sistem ini dirancang khusus untuk memperkuat tata kelola perizinan ekspor-impor komoditas Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, serta menjadi bagian dari aksi prioritas dalam Stranas PK.



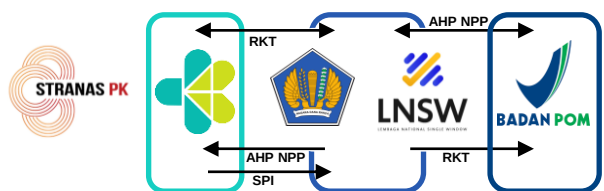
AKSI PENGUATAN
TATA KELOLA
IMPOR



AKSI
DIGITALISASI
LAYANAN PUBLIK

Dalam rangka mewujudkan milestone pada aksi tersebut, Inspektoral Utama telah melaksanakan rapat koordinasi awal dengan Tenaga Ahli Stranas PK dan Unit terkait di Badan POM (Direktorat Keamanan, Mutu, Ekspor Impor Obat, Narkotik, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Selain itu, Inspektoral Utama bersama unit teknis juga telah menghadiri pertemuan pada 19 Maret 2025 yang diadakan oleh Tim Stranas PK dalam rangka berkoordinasi terkait pembahasan usulan kelengkapan indikator/parameter profiling pelaku usaha pada sistem SSI ISRM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Layanan perizinan berusaha di BPOM telah terdigitalisasi dan dilakukan secara elektronik serta terintegrasi melalui Sistem OSS. Proses perizinan BPOM yang disampaikan dalam rangka mewujudkan milestone aksi adalah Izin Edar Kosmetik (Notifikasi Kosmetik) dan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kebijakan, mekanisme/alur perizinan, serta tangkapan layar aplikasi perizinan telah disampaikan sebagai data dukung.





BAB V.

STRATEGI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KEDEPAN

UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

BPOM Mobile

BPOM terus mendorong inovasi dalam menciptakan solusi yang tidak hanya meningkatkan kinerja lembaga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah melalui inovasi “Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman”.

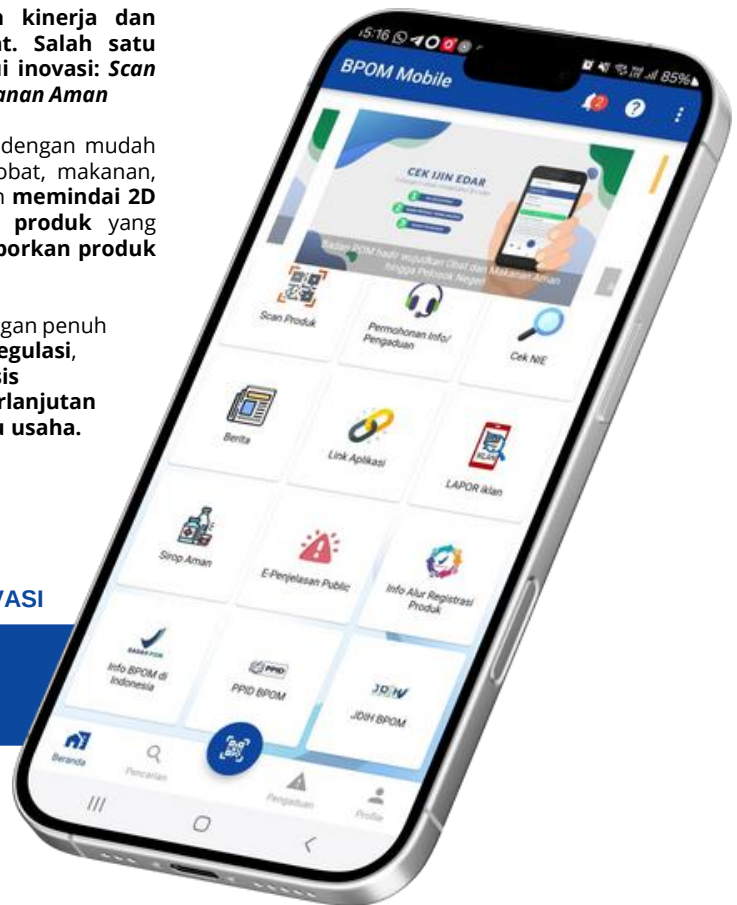
Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memverifikasi legalitas dan keamanan produk obat, makanan, kosmetik, serta suplemen kesehatan melalui pemindaian 2D Barcode atau memasukkan nomor registrasi yang tertera pada kemasan. Fitur pelaporan juga tersedia jika ditemukan produk yang perlu ditindaklanjuti oleh BPOM.

Inovasi ini telah diimplementasikan sejak tahun 2018 dan memenuhi prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hingga aspek keberlanjutan program. Kehadiran BPOM Mobile menjadi bagian dari transformasi digital yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

BPOM terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah melalui inovasi: Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman

Melalui aplikasi **BPOM Mobile**, masyarakat dapat dengan mudah memverifikasi **keamanan dan legalitas** produk obat, makanan, kosmetik, serta suplemen kesehatan, cukup dengan **memindai 2D barcode** atau **memasukkan nomor registrasi produk** yang tertera pada kemasan. Pengguna juga dapat **melaporkan produk yang mencurigakan** langsung melalui aplikasi.

Diluncurkan sejak **2018**, inovasi ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan BPOM, baik dari sisi **kebijakan dan regulasi**, **kesesuaian dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, maupun dari sisi **program keberlanjutan** serta **manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha**.



KELOMPOK KEBERLANJUTAN INOVASI

TOP 5

Tahun 2024

Pencapaian
200
HARI KERJA
Kepala BPOM RI

**DARI AKAR
NUSANTARA
MENUJU PANGGUNG
DUNIA**

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D